

EVALUASI IMPLEMENTASI KONSEP *GREEN PLANNING AND DESIGN*

**(STUDI KASUS PADA KAWASAN KOTA BARU MAMMINASATA DI
KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS)**

TESIS

Diajukan Oleh:

PANJHI ARIEQ NAUFAL MUGNI

NIM: 4621102017



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister**

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023

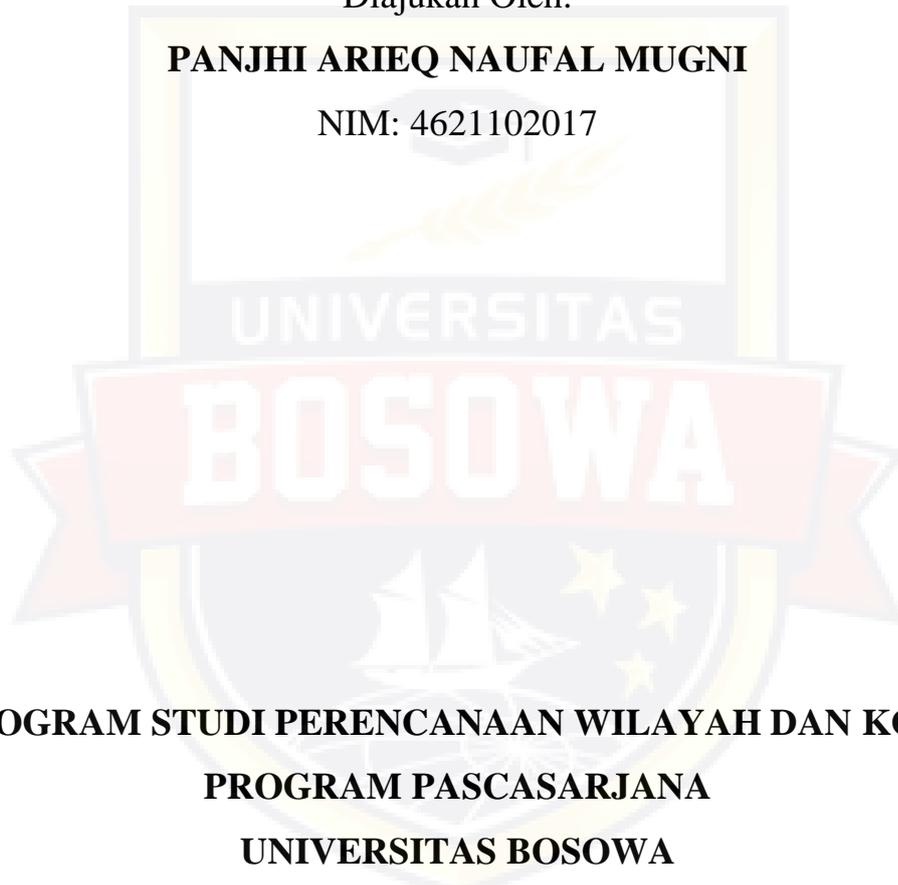
EVALUASI IMPLEMENTASI KONSEP *GREEN PLANNING AND DESIGN*

**(STUDI KASUS PADA KAWASAN KOTA BARU MAMMINASATA DI
KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS)**

Diajukan Oleh:

PANJHI ARIEQ NAUFAL MUGNI

NIM: 4621102017



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : EVALUASI PENERAPAN KONSEP
"GREEN CITY"
(Studi Kasus Pada kawasan kota baru
Moncongloe Metropolitan Mamminasata)
2. Nama Mahasiswa : Panjhi Arieq Naufal Mugni
3. NIM : 46 21 102 017
4. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

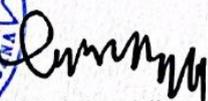
Pembimbing II

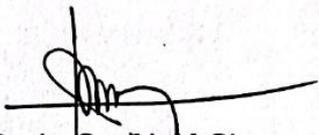
12/5/2023

Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin., MS


Dr. Ir. Syafrî, M.Si

Mengetahui:


Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin., MS
NIDN. 00-050863-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota

Dr. Ir. Syafrî, M.Si
NIDN. 09-050768-04

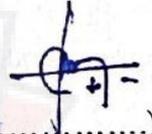
Tanggal Pengesahan: 12 Mei 2023

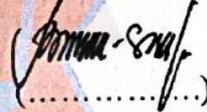
HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2022
Tesis Atas Nama : Panjhi Arieq Naufal Mugni
NIM : 4621102017

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

PANITIA UJIAN TESIS
Ketua : Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.S. 

(Pembimbing 1)
Sekertaris : Dr. Syafri, S.T., M.Si. 

(Pembimbing 2)
Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya. M.Si 

2. Prof. Dr. Haeruddin Saleh, S.E., M.Si 

Makassar, 19 Agustus 2022


Direktur
Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.S. 

NIDN. 00-050863-01

PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Panjhi Arieq Naufal Mugni
NIM : 4621102017
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “Evaluasi Implementasi Konsep *Green Planning And Design* (Studi Kasus Pada Kawasan Kota Baru Mamminasata Di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros)” adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak dizinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri.

Sumber referensi yang dikutip dan yang dirujuk telah tertulis dengan lengkap pada daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 19 Agustus 2023

Pembuat Pernyataan


Panjhi Arieq Naufal Mugni

ABSTRAK

Panji Arieq Naufal Mugni, Evaluasi Implementasi Konsep Green Planning And Design (Studi Kasus Pada Kawasan Kota Baru Mamminasata Di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros). Dibimbing oleh: Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin., MS, selaku pembimbing I dan Dr. Ir. Syafri., Msi selaku pembimbing II.

Pengembangan kawasan perkotaan di Indonesia berkembang sangat cepat, dan dinamis sehingga aktivitas dan pengembangannya akan menimbulkan berbagai macam problematika dan dampak permasalahan lingkungan seperti ketidakseimbangan antara pertumbuhan kawasan perkotaan dan peningkatan kualitas lingkungan. Kondisi inilah yang menjadikan Kota menjadi tidak nyaman untuk dihuni. Kabupaten Maros pun telah menjadi kabupaten yang berkembang sangat pesat mengikuti perkembangan kota Metropolitan Makassar sebagai kota Induk, memaksa Kabupaten Maros yang menjadi bagian dari kawasan perkotaan Mamminasta (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar), menjadi berkembang dengan cepat. Terkhusus pada kawasan perkotaan baru di Kecamatan Moncongloe yang menjadi kawasan kota Satelit. Namun adapula ancaman yang terjadi di Kecamatan Moncongloe yaitu sering terjadinya Banjir, pembakaran sampah oleh masyarakat serta pengelolaan drainase yang kurang baik maka diperlukan suatu konsep pencegahan dan penanganan untuk menanggulangi permasalahan tersebut yaitu konsep kota hijau atau biasa disebut "*Green city*". Adapun konsep pendekatan ini masih belum maksimal diterapkan di Kecamatan Moncongloe, maka output dari penelitian ini yaitu mengevaluasi seberapa besarkah penerapan yang telah dilakukan di lokasi penelitian serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja dari setiap indikator kota hijau.

Kata Kunci: Mamminasata, Kota Satelit, *Green City*, Strategi.

ABSTRACT

Panjhi Arieq Naufal Mugni, Evaluation of the Implementation of the Green Planning and Design Concept (Case Study in the Mamminasata New City Area in Moncongloe District, Maros Regency). Guided by: Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin., MS, as the first Thesis Adviser and Dr. Ir. Syafri., Msi as the second Thesis Adviser.

The development of urban areas in Indonesia is developing very fast, and is dynamic, so that its activities and development will cause various kinds of problems and impacts of environmental problems, such as imbalances between the growth of urban areas and the improvement of environmental quality. This condition makes the city uncomfortable to live in. Maros Regency has also become a district that is developing very rapidly following the development of the Metropolitan city of Makassar as the main city, forcing Maros Regency which is part of the Mamminasta urban area (Makassar, Maros, Sungguminasa, and Takalar) to develop rapidly. Especially in the new urban area in Moncongloe District which is a satellite city area. However, there are also threats that occur in Moncongloe District, namely frequent flooding, burning of garbage by the community and poor drainage management, so a concept of prevention and handling is needed to overcome these problems, namely the concept of a green city or commonly called "Green city". The concept of this approach is still not maximally applied in Moncongloe District, so the output of this study is to evaluate how much implementation has been done in the research location and formulate strategies to improve the performance of each indicator of a green city

Keywords:

Mamminasata; Green City; Strategy.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Segala puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, Tuhan yang Maha Esa, Pencipta Alam semesta beserta isinya dan tempat berlindung bagi ummat-Nya. Shalawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Atas limpah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul Evaluasi Implementasi Konsep *Green Planning And Design* (Studi Kasus Pada Kawasan Kota Baru Mamminasata Di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros). Penelitian ini berisikan tentang salahsatu indikator penerapan kota hijau yang diterapkan di Kawasan perkotaan Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Jouharotun Ni'mah dan Ayahanda Ir. Muchtar Affandy yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnnya serta perhatian moril dan materilnya. Semoga Allah S.W.T senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas segala didikan serta budi baik dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar yang selama ini telah meluangkan dan memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta pengetahuannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis sejak awal penulisan tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Andi Muhibuddin, M.S. Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa sekaligus Pembimbing I yang senantiasa mengevaluasi naskah tesis, memberikan masukan perbaikan, memberikan penilaian dan penguasaan kontekstual dalam penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Dr. Ir. Syafri., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar sekaligus Pembimbing II yang selama ini dengan kemurahan hati dan juga kebijakan beliau telah sangat membantu penulis selama proses perkuliahan berjalan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Prodi Program Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar, terima kasih atas segala bimbingan, didikan dan bantuan selama penulis menuntut ilmu di kelas Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar sejak awal hingga selesai.

5. Seluruh Pegawai Tata Usaha, Administrasi, dan staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang telah banyak memberi bantuan dan dukungan.
6. Ibu Kurniati Andi Sarka, ST, MSP selaku Kepala Bidang Tata ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros yang bersedia membantu penulis serta memberikan data dan informasi terkait tentang lokasi penelitian.
7. Saudari tercinta Niken Ratna Handayani Muchtar, serta seluruh keluarga atas do'a, dukungan dan motivasinya yang membuat saya selalu semangat sampai saat ini
8. Saudara Muhammad Farid Usman, ST, dan Ryan Prtama Putra, ST yang selalu memberi masukan, saran serta menemani berdiskusi pada saat penulis menyusun penelitian ini.
9. Saudari Tirta Hastyn, ST yang selalu memberi masukan, saran serta menemani berdiskusi pada saat penulis menyusun penelitian ini.
10. Seluruh sahabat dan saudara-saudari seperjuangan PWK 2016 (SPACE) yang selalu memberikan semangat, kritikan, dan dukungan serta bantuan kepada penulis.
11. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, doa dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematika penulisan beserta isinya. Oleh karena itu, dari hati yang terdalam penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini kedepannya.

Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Aamin. Akhir kata penulis mengucapkan

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Agustus 2023

Penulis

PANJHI ARIEQ NAUFAL MUGNI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORISINILAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan Penelitian	5
D.Manfaat Penelitian	6
E.Ruang Lingkup.....	7
F.Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	8
A.Deskripsi Teori	8
1. Pengertian Kota.....	8
2. Teori Kota Layak Huni.....	9
3. Pengertian pertumbuhan dan Pembangunan kota	10
4. Problematika perkotaan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan.....	11
5. Kebijakan Pemerintah	12
B.Tinjauan Empirik	15
C.Kerangka Pikir	18

D. Alur Penelitian	19
E. Hipotesis	20
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian	20
C. Waktu Penelitian	20
D. Metode	23
1. Metode Penelitian	23
2. Metode Pengambilan Data	23
E. Variabel Penelitian	27
F. Jenis dan Sumber Data	27
G. Teknik Analisis Data	30
H. Definisi Operasional	32
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten	33
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Maros	33
2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Moncongloe	36
a. Kondisi Fisik dan Lingkungan	38
b. Kependudukan	38
c. Penggunaan Lahan	40
d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Moncongloe	42
e. Jaringan Transportasi	46
B. Analisis Muatan Indikator Kota Hijau	47
1. a. <i>Green Planning and design</i>	49
C. Strategi Penerapan Kota Hijau dan Keberlanjutan Pembangunan	57
BAB V PENUTUP	61
A. KESIMPULAN	61

B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
2.1	Jurnal/Penelitian Terdahulu.....	15
3.1	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	20
3.2	Jenis dan Sumber data penelitian	23
3.3	Variabel dan Indikator Penelitian.....	26
3.4	Batasan penentuan skoring indikator <i>Green Planning and Design</i>	27
4.1	Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Maros	30
4.2	Tinggi wilayah diatas permukaan laut menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2019.....	32
4.3	Rata-Rata suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Maros Tahun 2019.....	33
4.4	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan	34
4.5	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2016, 2017, dan 2018.....	35
4.6	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2018.....	36
4.7	Luas Wilayah Desa di Kecamatan Moncongloe Tahun 2019.....	37
4.8	Jenis Topografi di Kecamatan Moncongloe Tahun 2019.....	39

4.10	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kecamatan Moncongloe Tahun 2019.....	40
4.11	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kecamatan Moncongloe Tahun 2019.....	41
4.12	Penggunaan lahan sawah per-desa Di Kecamatan Moncongloe Tahun 2019.....	44
4.13	Banyaknya Angkutan Umum di Kecamatan Moncongloe, Tahun 2017.....	46
4.14	Panjang Jalur Transportasi Di Kecamatan Moncongloe Tahun 2019.....	47
4.15	Green Planning and Design di Kecamatan Moncongloe.....	48
4.15	Green Planning and Design di Kecamatan Moncongloe.....	57

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Teks	Halaman
3.1	Peta Administrasi Lokasi Penelitian.....	21
4.1	Peta Administrasi Kabupaen Maros.....	31
4.2	Peta Administrasi Kecamatan Moncongloe.....	38
4.3	Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Moncongloe.....	43
4.4	Peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Moncongloe.....	45
4.5	Peta Administrasi Pembagian Wilayah Perencanaan.....	52
4.6	Peta Rencana Struktur Ruang.....	53
4.7	Peta Rencana Struktur Ruang Pusat Pelayanan Kawasan.....	54

4.6 Rencana Pengembangan Kawasan Kota Hijau Kota Baru
Moncongloe.....

56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan kota yang semakin cepat berimplikasi terhadap timbulnya berbagai permasalahan perkotaan seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, kesenjangan sosial, dan berkurangnya luas ruang terbuka hijau.

Permasalahan perkotaan semakin berat karena hadirnya fenomena perubahan iklim, sehingga kota menjadi tidak nyaman untuk ditinggali.

Konsep *Green City* dapat menjadi solusi yang efektif dalam penanganan permasalahan tersebut.

Kecenderungan yang terjadi pada kota-kota dunia sampai saat ini adalah menata kembali kotanya untuk dapat lebih ke arah keseimbangan antara daerah 'hijau' dengan 'non hijau', agar tercapai lingkungan perkotaan yang 'layak huni', yaitu kondisi kehidupan yang sehat, nyaman dan terus berkelanjutan.

Kondisi yang sering terjadi di lapangan secara langsung maupun tidak menunjukkan bahwa lahan-lahan yang semula berupa 'zona hijau' adalah yang paling banyak dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup di kota, karena penilaian sebagian besar masyarakat termasuk para pengelola kota ruang terbuka (hijau maupun tidak) ini 'tidaklah ada manfaatnya, hanya sebagai tempat hidup vektor penyakit, tempat dimana para pengemis dan gelandangan hidup, dan seterusnya. Hukum pun menjadi sulit diterapkan, pada ruang-ruang terbuka yang cukup berbahaya, seperti bantaran sungai dan pantai, jalur kereta api bahkan di bawah saluran kawat listrik tegangan tinggi (SUTET) penuh dengan bangunan permukiman dari yang mewah sampai yang seadanya dan kumuh.

Konsep *Green City* atau kota hijau muncul pertama kali dalam pertemuan PBB yang dihadiri lebih dari 100 walikota dan gubernur di San Fransisco,

Amerika Serikat, pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2005. Pertemuan tersebut, diantaranya melahirkan kesepakatan bersama mewujudkan pengembangan kota dengan konsep 'kota hijau'. (M. Ferita Tri Nugrahini,2014)

Green city merupakan sebuah ide dalam mewujudkan kota yang ramah lingkungan, dengan memanfaatkan dan menyeimbangkan keberadaan air dan energi dengan efektif dan efisien serta mengurangi jumlah limbah, memaksimalkan peran lingkungan alami serta lingkungan buatan yang berguna untuk meningkatkan kesehatan lingkungan secara berkelanjutan.

Konsep *Green city* merupakan pengembangan dari konsep kota berkelanjutan, yang didasari prinsip pembangunan berkelanjutan dan kondisi nyata perkembangan kota, sehingga mampu menjawab kebutuhan perkotaan secara nyata sekaligus menanggapi persoalan global perubahan iklim (Fuady.M, 2021).

Menurut Fuady (2021) Konsep ini juga memadukan sistem transportasi perkotaan, meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, dan mengoptimalkan lingkungan yang alami dan buatan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan unsur lingkungan, sosial, dan ekonomi kota.

Kota Hijau adalah sebuah konsep perencanaan kota yang berkelanjutan (*sustainable*). Kota Hijau pun dikenal sebagai Kota Ekologis atau dengan kata lain merupakan kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan kota yang menyehatkan dapat mewujudkan suatu kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni dengan memaksimalkan potensi sosial dan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor-sektor yang terkait dan sinkron dengan perencanaan perkotaan.

Agar dapat terwujud, maka perlu usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Dapat dikatakan

pula bahwa kota hijau (*green city*) merupakan kota yang sehat. Kota hijau harus dipahami sebagai kota yang memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu yang ramah lingkungan, menjamin kesehatan lingkungan, dan menyinergikan lingkungan alami dan buatan. Kota hijau atau *green city* adalah konsep perkotaan, dimana masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial budaya (kearifan lokal) harus seimbang demi generasi mendatang yang lebih baik. (Hasanah, 2015).

Maka dari itu, dibutuhkan perencanaan ruang berupa perencanaan umum dan perencanaan strategis. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota) merupakan sebuah perencanaan umum yang menjadi acuan bagi sebuah perkotaan untuk membuat penataan ruang di daerah/kotanya dan disusun lebih detail lagi di dalam rencana strategis berbentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota dan RTR Kawasan Strategis Kota. Pemerintah kota dalam hal ini Walikota sebagai kepala daerah beserta para staf yang berkompeten di bidang tata kota harus memiliki visi yang jelas terhadap kemajuan sebuah perkotaan.

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan (PUPR), Direktorat Jenderal Penataan Ruang telah membuat sebuah program yang diberi nama Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pada tahun 2011 atau dapat dikatakan sebagai program kota hijau yang berbasis masyarakat (empowerment), yang dalam implementasinya dimuat dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten dan Kota. P2KH ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekaligus responsif terhadap perubahan iklim yang saat ini sedang menjadi isu dunia.

Menurut Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Kota Hijau atau *Green city* terdiri dari delapan elemen, yaitu: (1) *Green planning and design* (Perencanaan dan rancangan hijau), (2) *Green open space* (Ruang terbuka hijau), (3) *Green Waste* (Pengelolaan sampah hijau), (4) *Green transportation* (Transportasi hijau), (5) *Green water* (manajemen air yang hijau), (6) *Green energy* (Energi hijau), (7) *Green building* (Bangunan hijau), (8) *Green Community* (Komunitas hijau).

Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar atau dapat disebut sebagai Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar, dan berfungsi sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.

Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia, keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antara wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota di kawasan perkotaan Mamminasata, Sistem perkotaan kawasan perkotaan Mamminasata yang hierarki, terstruktur dan seimbang sesuai dengan fungsi tingkat pelayanannya. (PP No.15 Tahun 2011)

Permasalahan Perkotaan yang sedang dihadapi kawasan perkotaan Mamminasata pada saat ini adalah kurangnya pengelolaan sampah, kemacetan, banjir, serta partisipasi masyarakat dalam penanganan lingkungan masih belum maksimal.

Kecamatan Moncongloe adalah salah satu dari 14 kecamatan yang berada di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas Kecamatan Moncongloe sekitar 46,87 Km², Serta berada pada ketinggian 500 mdpl, Ibu Kota Kecamatan ini berada di Kelurahan Pamanjengan, Adapun Pusat Ibu Kota Kecamatan Moncongloe berada pada jarak 22 Km dari pusat kota yaitu kecamatan Turikale yang merupakan Ibu kota kabupaten dan pusat pemerintahan di Kabupaten Maros, Kecamatan Moncongloe berbatasan langsung dengan Kota Makassar di sebelah barat, Kecamatan Tanralili di sebelah timur, Kecamatan Mandai di sebelah Utara dan Kabupaten Gowa di Sebelah Selatan. (Buku BPS Kecamatan Moncongloe dalam angka Tahun 2019).

Kecamatan Moncongloe memiliki 5 (lima) pembagian wilayah yang semuanya berstatus sebagai desa dengan rincian jumlah dusun sebanyak 17 dusun. Dari 5 desa itu pula masing-masing memiliki perkembangan yang

berbeda-beda, yaitu 1 desa dengan perkembangan desa swadaya, 1 desa dengan perkembangan desa swakarya, dan 3 desa dengan perkembangan swasembada.

Kecamatan Moncongloe diperuntukkan sebagai kawasan kota baru satelit Mamminasata yang memiliki tujuan penataannya yaitu “Bertujuan untuk mewujudkan ruang perkotaan Kota Baru Mamminasata Moncongloe sebagai Kota Satelit masa depan yang hijau, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. (Perbup No.43 Tahun 2021 Tentang RDTR Kota Baru Mamminasata di Kecamatan Moncongloe).

Sebagai solusi pemecahan permasalahan kota, Khususnya di Kecamatan Moncongloe, Pengembangan konsep Kota Hijau merupakan salah satu langkah yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan kota demi terwujudnya kehidupan kota yang ekonomis, ekologis, dan kehidupan sosial yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai analisis penerapan konsep *Green Planning and Design* di Kecamatan Moncongloe.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar keberhasilan penerapan konsep *Green Planning and Design* dalam mendukung kota hijau pada pengembangan kawasan kota baru Moncongloe metropolitan Mamminasata?
2. Apa kendala implementasi konsep *Green Planning and Design* dalam pembangunan kawasan kota baru Moncongloe Mamminasata?
3. Bagaimana strategi dalam penerapan konsep *Green Planning and Design* dan keberlanjutan pembangunan kawasan kota baru Moncongloe Mamminasata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Mengevaluasi seberapa besar keberhasilan penerapan konsep *Green Planning and Design* dalam mendukung kota hijau pada pengembangan Kawasan Kota Baru Moncongloe Metropolitan Mamminasata;

2. Mengidentifikasi kendala implementasi *Green Planning and Design* dalam pembangunan Kawasan Kota Baru Moncongloe Mamminasata; dan
3. Merumuskan strategi dalam penerapan konsep *Green Planning and Design* dan keberlanjutan pembangunan kawasan kota baru Moncongloe Mamminasata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik yang dapat diperoleh oleh dalam penelitian ini adalah seperti:

- a) Menambah referensi atau wawasan peneliti tentang pentingnya penerapan kota hijau berkelanjutan;
- b) Pembahasan terkait evaluasi penerapan konsep kota hijau yang belum banyak dibahas oleh peneliti lain yang menjadikan daya tarik peneliti dalam penelitian ini;
- c) Peneliti dapat meningkatkan pengetahuan dalam penggalian data dalam penelitian, menganalisis data, mengkaji dan menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan secara langsung di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang peroleh bagi pengambil kebijakan sebagai bahan merumuskan dan merencanakan terkait kebijakan secara komprehensif terhadap perencanaan kota. Sehingga pemerintah dapat mengetahui pemanfaatan kota hijau di Kota Baru Mamminasata Kecamatan Moncongloe dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dampak apa yang ditimbulkan oleh alih fungsi lahan pertanian produktif sehingga dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Lingkup Penelitian ini difokuskan pada Evaluasi penerapan konsep *Green Planning and Design* di Kawasan Perkotaan Satelit Mamminasata Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

Secara lingkup pembahasan, pengkajian dalam penelitian ini difokuskan pada tiga sub pokok pembahasan, yaitu mengukur seberapa besar keberhasilan penerapan konsep *Green City* di Kota Baru Moncongloe lalu mengidentifikasi apa saja kendala dalam proses penerapan konsep kota hijau kemudian membuat rumusan strategi dalam penerapan konsep kota hijau secara sustainable kedepannya bagi kota baru Moncongloe.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal ini di bagi ke dalam lima Bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Ruang Lingkup serta Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang Batasan Pengertian Judul, Tinjauan Pustaka, pengertian konsep *Green City*, faktor pengembangan potensi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Definisi Operasional, Kerangka Pikir.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang Gambaran Umum Kabupaten Maros, Gambaran Umum Kecamatan Moncongloe, muatan kota hijau, Tinjauan Lokasi Studi, tingkat pendidikan, dan pendapatan.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Landasan Teori

1. Pengertian Kota

Pada umumnya, cikal bakal sebuah kota berasal dari adanya permukiman. Sejak ribuan tahun lalu, permukiman sudah ada sebagai bentuk perlindungan kepada penduduk, baik dari kelompok masyarakat yang mempunyai hubungan keluarga maupun campuran dari berbagai kelompok masyarakat. Berkembangnya kota juga terjadi secara bertahap dari berbagai sistemnya yang ada, baik dari sistem pertanian dan peternakan, serta kemajuan dalam bidang teknologi yang memungkinkan terbentuknya sistem kehidupan yang lebih maju di dalam masyarakat. Pola kehidupan masyarakat atau orang yang selalu berpindah tempat atau wilayah kemudian bergeser menjadi menetap di tempat atau wilayah tersebut dengan jumlah dan besaran wilayah yang terus bertambah. Pengertian kota dibagi menjadi dua definisi, yaitu definisi klasik dan definisi modern.

a) Definisi Klasik

Kota adalah suatu permukiman yang realif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial.

b) Definisi Modern

Kota adalah suatu permukiman yang dirumuskan bukan dari ciri morfologi kota, tetapi dari suatu fungsi yang menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian ruang dan hirarki tertentu.

Adapun menurut Bintarto, dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-

unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, dengan corak kehidupan yang bersifat materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya.

2. Teori Kota Hijau

Kota Hijau atau disebut dengan kota berkelanjutan, adalah kota yang mengedepankan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup. Suatu keseimbangan merupakan hal penting untuk menjamin adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia, tanpa mengurangi peluang generasi yang akan datang untuk menikmati kondisi yang sama (Amira,2014).

Pengembangan kota berkelanjutan, adalah kota yang memiliki perencanaan dengan mengutamakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, efisiensi penggunaan energi, pengembangan sumberdaya manusia, dan memberi manfaat ekonomi (Wunas,2011).

Salah satu konsepsi kota baru yang cukup besar pengaruhnya terhadap kaidah-kaidah perancangan kota adalah Konsep Taman Kota (*Garden City*), yang dikemukakan oleh Ebenezer Howard. *Garden City* merupakan asal mula dari kemunculan konsep kota berkelanjutan, karena desain *Garden City* memiliki elemen-elemen yang mendukung keberlanjutan kota. Aspek lingkungan dan humaniti menjadi pedoman dalam desain *Garden City*. Dua aspek ini juga yang mendukung keberlanjutan dari sebuah kota guna mencapai kota yang ramah bagi warga dan lingkungan untuk generasi mendatang. Di Indonesia, konsep *Garden City* ini juga menjadi pedoman bagi banyak perencanaan di kota.

3. Teori Kota Layak Huni

Menurut (Hosam K. El Ghorab, dkk, 2015) Ketika kota layak huni digambarkan sebagai sistem perkotaan yang berkontribusi pada aspek kesejahteraan fisik, sosial dan mental, serta perkembangan pribadi seluruh

masyarakat didalamnya, pendekatan ini adalah tentang melaksanakan penataan ruang kota yang dapat pula memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip yang terdapat pada pendekatan ini adalah kesetaraan, martabat, aksesibilitas, keramahan, partisipasi dan pemberdayaan. (Hosam K. El Ghorab, Heidi A. Shalaby, 2015)

4. Pengertian pertumbuhan dan Pembangunan kota

Pertumbuhan dan pembangunan kota yang sangat cepat sudah terjadi di negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Ini merupakan tantangan baru dan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia, terlebih karena lebih dari 52% penduduk nasional mendiami kawasan perkotaan. Indonesia saat ini fokus pada penanganan daerah perkotaan yang sangat rentan mengalami dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi menjadi unsur penting didalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan (Nugroho dan Syaodih, 2010).

Menurut Irwan (2007) terdapat banyak permasalahan. Permasalahan lingkungan perkotaan yang menghambat terwujudnya kota hijau disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk serta laju penambahan luas lahan terbangun, semakin menurunnya ruang terbuka hijau, terjadinya pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah.

Ada banyak pendekatan dalam proses perencanaan seperti “*Green City*”, “*Eco City*” dan “*Liveable City*”. Setiap pendekatan tersebut memiliki tujuan khusus yang berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan. Kota hijau dapat didefinisikan sebagai sebuah kota yang berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan, contohnya seperti mengurangi limbah, melakukan daur ulang, menurunkan emisi, meningkatkan kualitas kawasan perumahan sekaligus memperluas ruang terbuka hijau, dan mendorong pengembangan bisnis lokal masyarakat yang berkelanjutan.

Kota yang ramah lingkungan dapat didefinisikan sebagai metafora yang mencakup berbagai persoalan ekologi perkotaan yang bertujuan untuk mencapai kota yang *Sustainables*. Pendekatan ini mengusulkan Berbagai kebijakan lingkungan, sosial, dan kelembagaan yang diarahkan untuk mengelola ruang kota agar berkelanjutan. Pendekatan ini menggunakan dan menekankan pada pengelolaan lingkungan melalui serangkaian proses perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Juga, *Eco-city* dijelaskan sebagai kota yang menyediakan standar hidup yang dapat diterima masyarakat tanpa menguras ekosistem dan lingkungan di mana ia bergantung.

5. Problematika perkotaan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan

Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk kian bertambah sementara lahan untuk tempat tinggal tidak bertambah. Hal tersebut diperparah dengan masalah proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan semakin bertambah. Berdasarkan data dari PBB pada tahun 2014, sebanyak 54% dari 7,32 miliar penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan bahkan diperkirakan pada tahun 2050 angka tersebut mencapai 66% dan sebagian besar terjadi di negara-negara Asia. Fenomena ini sejalan dengan lahirnya "*mega cities*" yaitu kota dengan jumlah penduduk melebihi 10 juta jiwa. Pada tahun 2014, telah tercatat 28 kota dunia merupakan *mega cities* dan 16 diantaranya berada di Asia termasuk di Indonesia.

Masalah-masalah tersebut akan menimbulkan efek domino terhadap masalah yang lainnya, contohnya permasalahan sosial-ekonomi yaitu pekerjaan, pendidikan, kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya. Bahkan dengan menumpuknya penduduk di daerah perkotaan akan melahirkan kawasan pemukiman yang kumuh (*slum area*) terutama di Afrika dan Asia. Kawasan pemukiman yang kumuh ini sangat minim akses terhadap air bersih dan sanitasi, tidak memiliki legalitas untuk tinggal, serta memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi.

6. Kebijakan Pemerintah

a) Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Program Pengembangan Kota Hijau adalah upaya untuk kota yang berkelanjutan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Kabupaten dalam rangka mewujudkan delapan atribut kota hijau yaitu : (1) Perencanaan dan Perancangan kota hijau yang ramah lingkungan, (2) Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), (3) Konsumsi Energi yang efisien, (4) Pengelolaan air yang efektif, (5) Pengelolaan limbah dengan prinsip 4R, (6) Bangunan Hemat Energi, (7) Penerapan sistem yang berkelanjutan, (8) Peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas kota hijau.

Kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi yang menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip kota yang berkelanjutan (P2KH, 2015).

Perumahan yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk menghemat energi, air dan makanan serta mengurangi buangan limbah dan pencemaran air (P2KH,2015).

Kota hijau yang kita cita-citakan ini adalah kota masa depan milik generasi penerus. Hal ini sejalan dengan harapan kita semua untuk mulai mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

b) Delapan Muatan Kota Hijau (*Green City*)

(1) *Green Planning and Design*

Perencanaan dan rancangan hijau adalah perencanaan tata ruang yang berprinsip pada konsep pembangunan kota

berkelanjutan. *Green city* menuntut perencanaan tata guna lahan dan tata bangunan yang ramah lingkungan serta penciptaan tata ruang yang atraktif dan estetik.

(2) *Green Open Space* (Ruang Terbuka Hijau)

(RTH) adalah salah satu elemen terpenting kota hijau. Ruang terbuka hijau berguna dalam mengurangi polusi, menambah estetika kota, serta menciptakan iklim mikro yang nyaman. Hal ini dapat diciptakan dengan perluasan lahan taman, koridor hijau dan lain-lain.

(3) *Green Waste* (Pengelolaan sampah hijau)

Green waste adalah pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada *reduce* (pengurangan), *reuse* (penggunaan ulang) dan *recycle* (daur ulang). Selain itu, pengelolaan sampah hijau juga harus didukung oleh teknologi pengolahan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan.

(4) *Green Transportation* (Transportasi Hijau)

Green transportation adalah transportasi umum hijau yang fokus pada pembangunan transportasi massal yang berkualitas. *Green transportation* bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi massal, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, penciptaan infrastruktur jalan yang mendukung perkembangan transportasi massal, mengurangi emisi kendaraan, serta menciptakan ruang jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda.

(5) *Green Water* (manajemen air yang hijau)

Konsep *Green water* bertujuan untuk penggunaan air yang hemat serta penciptaan air yang berkualitas. Dengan teknologi yang maju, konsep ini bisa diperluas hingga penggunaan hemat

blue water (air baku/ air segar), penyediaan air siap minum, penggunaan ulang dan pengolahan *grey water* (air yang telah digunakan), serta penjagaan kualitas *green water* (air yang tersimpan di dalam tanah).

(6) *Green Energy* (Energi Hijau)

Green energy adalah strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui penghematan penggunaan serta peningkatan penggunaan energi terbarukan, seperti listrik tenaga surya, listrik tenaga angin, listrik dari emisi methana TPA dan lain-lain.

(7) *Green Building* (Bangunan Hijau)

Green building adalah struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan dan pembangunannya bersifat efisien, baik dalam rancangan, konstruksi, perawatan, renovasi bahkan dalam perubahan. *Green building* harus bersifat ekonomis, tepat guna, tahan lama, serta nyaman. *Green building* dirancang untuk mengurangi dampak negatif bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan penggunaan energi, air, dan lain-lain yang efisien, menjaga kesehatan penghuni serta mampu mengurangi sampah, polusi dan kerusakan lingkungan.

(8) *Green Community* (komunitas hijau)

Green community adalah strategi pelibatan berbagai *stakeholder* dari kalangan pemerintah, kalangan bisnis dan kalangan masyarakat dalam pembangunan kota hijau. *Green community* bertujuan untuk menciptakan partisipasi nyata *stakeholder* dalam pembangunan kota hijau dan membangun masyarakat yang memiliki karakter dan kebiasaan yang ramah lingkungan, termasuk dalam kebiasaan membuang sampah dan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program kota hijau pemerintah. Misi kota hijau sebenarnya tidak hanya sekedar

‘menghijaukan’ kota. Lebih dari itu, kota hijau dengan visinya yang lebih luas dan komprehensif, yaitu Kota yang Ramah Lingkungan, memiliki misi antara lain memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan baik secara lingkungan, sosial dan ekonomi secara seimbang.

c) Kedudukan Moncongloe Dalam Konteks Wilayah Mamminasata

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata) kedudukan Kecamatan Moncongloe berada pada sebagian wilayah Kabupaten Maros yang mencakup 12 (dua belas) wilayah Kecamatan. Adapun sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe berada pada zona B3 dan B4 yang memiliki karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah sampai sedang dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sedang.

B. Tinjauan Empirik

Penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. (Jihan Jamaluddin, Skripsi Universitas Hasanuddin, Tahun 2018), dengan judul Strategi Penerapan Konsep Green City di Kota Makassar.
2. (Nurul Anisyah Desdyanza, Skripsi IPB, Tahun 2014), dengan judul Evaluasi Serupa

Tabel 2.1
Jurnal/Penelitian Terdahulu

No	Judul (Nama, Sumber, & Tahun)	Rumusan Masalah	Metodologi Penelitian		Hasil
			Variabel Penelitian	Metode Analisis	
1.	Strategi Penerapan Konsep <i>Green City</i> di Kota Makassar (Jihan Jamaluddin, Skripsi Universitas Hasanuddin, Tahun 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Kondisi Eksisting indeks “<i>Green City</i>” di Kota Makassar? 2. Bagaimana tingkat kinerja kota Makassar terhadap indeks “<i>Green City</i>”? 3. Bagaimana Strategi Peningkatan Indeks “<i>Green City</i>” di Kota Makassar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Land use and Building</i> 2. <i>Transportasi</i> 3. <i>Waste</i> 4. <i>Water</i> 	Analisis Deskriptif kuantitatif	Indeks Kualitas dan Kuantitas di Kota Makassar.
2.	Evaluasi Penerapan Konsep Kota Hijau di Kota Bogor (Nurul Anisyah Desdyanza, Skripsi IPB, Tahun 2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Perkembangan dan Penataan Kota Bogor saat ini? 2. Seperti apa penerapan konsep kota hijau di kota bogor dalam pengembangan dan pembangunan kotanya? 	<i>green planning and design, green open space, green building, green waste, green transportation, green water, green energy, dan green community</i>	<i>Gap Analysis</i>	Merencanakan konsep pengembangan kota hijau berdasarkan delapan indikator kota hijau di Kota Bogor.

3. Evaluasi Penerapan Konsep Kota hijau di Kota Bukittinggi (Anisa Burman, Skripsi IPB)	<i>Energy & CO2, Land use and Buildings, Transport, Waste, Water, Sanitation, Air Quality dan Tatakelola Lingkungan</i>	Anallisis Deskriptif, kuantitatif, kualitatif, teknik analisa skoring Menggunakan standar AGCI, dan <i>Index of Hippines</i>	Kinerja Kota Bukittinggi termasuk kepada tingkatan <i>average</i> sehingga dapat dikatakan kota Bukittinggi dalam menerapkan konsep kota hijau sudah cukup baik dalam menerapkan konsep kota hijau.
4. Evaluasi Pengembangan kota Hijau (<i>Green City</i>) di Kota Kendari (Sri Mindasari, Hj. Rostin, Artikel Universitas Halu Oleo, Tahun 2015)	Air Limbah Domestik, Persampahan, Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Analisis deskriptif secara analitik.	Program pengembangan Kota Hijau (<i>Green City</i>) untuk Air Limbah Domestik dari tahun 2007- 2016 mencapai 87,29% ini berarti pemerintah harus mencukupi 12,71%, untuk sampah dari tahun 2007-2016 mencapai 43,98% ini berarti pemerintah harus mencukupi 56,02% ditahun 2020 untuk mecapai target Kota Hijau (<i>Green City</i>)

5. Analisis dan Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam Mendukung ”*Green City*” di Kota Ungaran Kabupaten Semarang

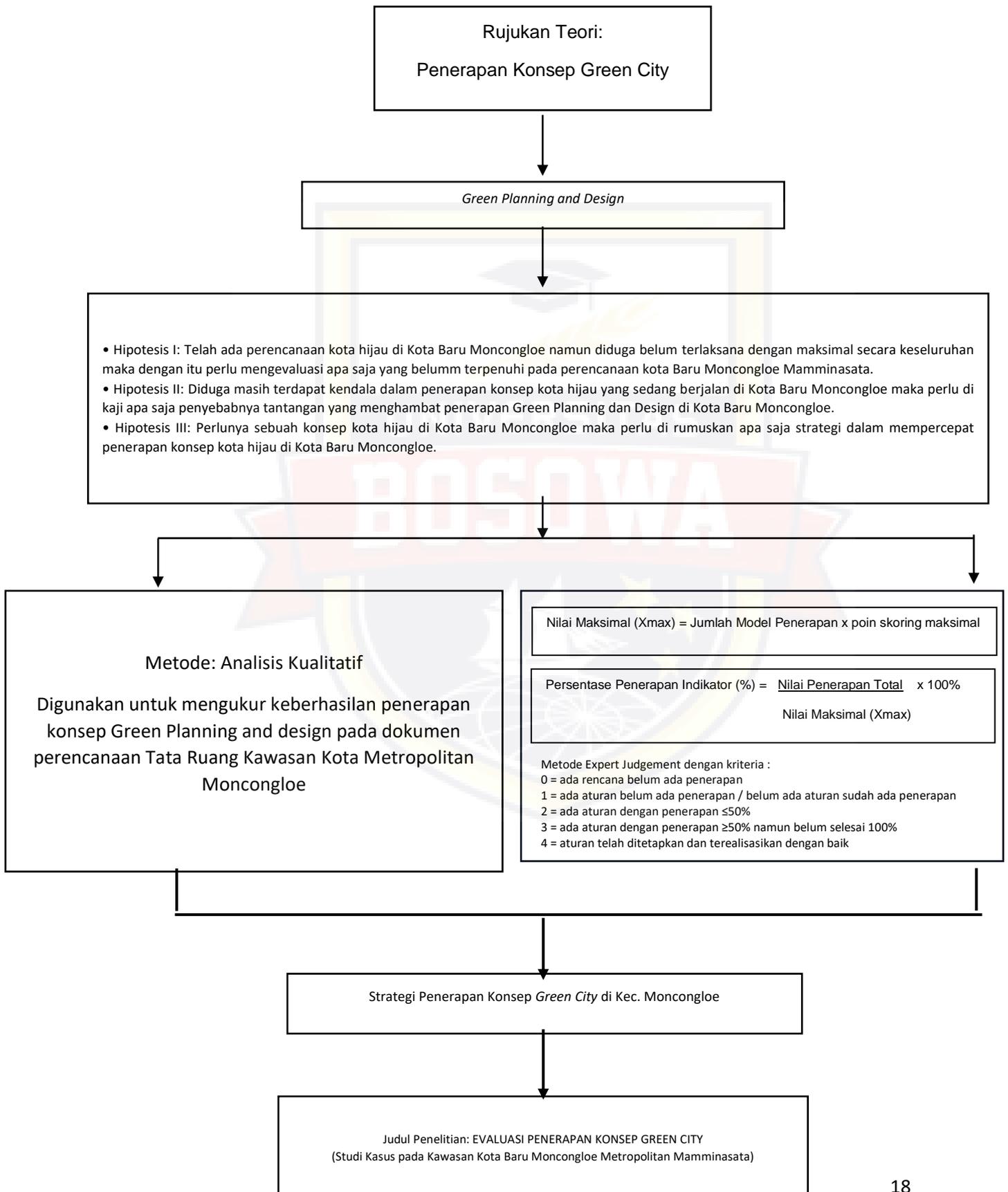
Ruang Terbuka Hijau, *Green Planning, Green Design,*

Analisis Kualitatif, analisis preferensi stakeholder.

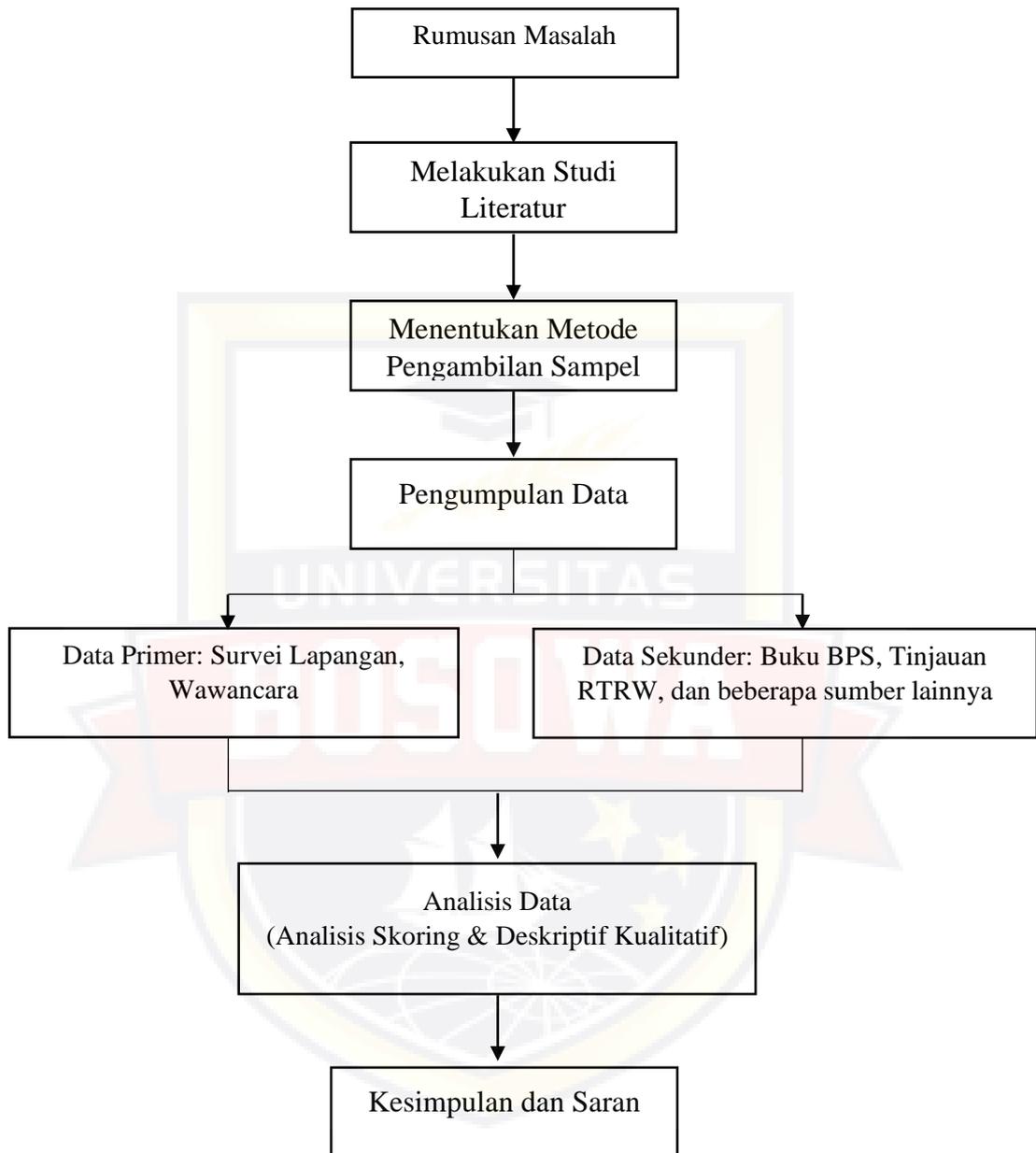
Arahan pengembangan RTH publik berdasarkan pendekatan green design memiliki konsep perancangan di mana RTH publik berfungsi sebagai penanda (*landmark*) Kota Ungaran serta saling terhubung (*path*) menciptakan identitas Kota Ungaran yang jelas. Konsep perancangan RTH publik juga mempertimbangkan pola aktivitas dan fungsi RTH untuk terciptanya RTH publik berbasis *green design*.



C. Kerangka Pikir



D. Alur Penelitian



E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugyono, 2013). Adapun hipotesis penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Hipotesis I:** Telah ada perencanaan kota hijau di Kota Baru Moncongloe namun diduga belum terlaksana dengan maksimal secara keseluruhan maka dengan itu perlu mengevaluasi apa saja yang belum terpenuhi pada perencanaan kota Baru Moncongloe Mamminasata.
- **Hipotesis II:** Masih terdapat kendala dalam penerapan konsep kota hijau yang sedang berjalan di Kota Baru Moncongloe maka perlu di kaji apa saja penyebabnya tantangan yang menghambat penerapan Green Planning dan Design di Kota Baru Moncongloe.
- **Hipotesis III:** Perlunya sebuah konsep kota hijau di Kota Baru Moncongloe maka perlu di rumuskan apa saja strategi dalam mempercepat penerapan konsep kota hijau di Kota Baru Moncongloe.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti tentang evaluasi penerapan konsep kota hijau di Kecamatan Moncongloe dengan melakukan pengukuran melalui dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan fakta aktual di lapangan sehingga ditemukan ketidaksesuaian perencanaan dalam penerapan konsep kota hijau maka penulis menyusun strategi agar penerapan konsep kota hijau terpenuhi seluruh atributnya sesuai dengan arahan Program Pengembangan Kota Hijau yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaannya penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal-hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian.

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.

Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.

Perhatian ketika seorang peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif akan lebih fokus tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. (McCusker, K., & Gunaydin, S. 2015)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros yang wilayah administratifnya terfokus di Kecamatan Moncongloe. Kecamatan Moncongloe merupakan salahsatu dari 14 Kecamatan yang berada di Kabupaten Maros, Luas Kecamatan Moncongloe sekitar 46,87 Km² Serta berada pada ketinggian 500 mdpl, Ibu Kota Kecamatan ini berada di Kelurahan Pamanjengan, Adapun Pusat Ibukota Kecamatan berada pada jarak 22 Km dari pusat Kota di Kecamatan Turikale yang merupakan Ibu kota kabupaten dan pusat pemerintahan, Kecamatan Moncongloe berbatasan langsung dengan Kota Makassar di sebelah barat, Kecamatan Tanralili di sebelah timur, Kecamatan Mandai di sebelah Utara dan Kabupaten Gowa di Sebelah Selatan.

Kecamatan Moncongloe merupakan Kecamatan yang mengalami proses transformasi spasial yang cukup signifikan di Kawasan Perkotaan Mamminasata dan merupakan kawasan *hinterland* dari Kota Makassar, terlebih lagi sejak beberapa tahun terakhir sampai dengan saat ini kosentrasi pembangunan untuk perumahan dan permukiman, perkantoran serta perdagangan jasa di Mamminasata berkembang sangat pesat maka perlu disusun Perencanaan Detail Tata ruangnya menggunakan konsep kota hijau sehingga perkembangan kota yang pesat tetap dapat menjaga ekosistem lingkungan hijau khususnya di Kabupaten Maros.

C. Metode

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai Evaluasi Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru Satelit Mamminasata di Kec. Moncongloe. Untuk memperoleh gambaran dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui metode penelitian kualitatif inilah peneliti berharap mampu mengungkapkan bagaimana penerapan indikator kota hijau di kota baru satelit Mamminasata di Kec. Moncongloe.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Widodo dan Mukhtar (2000:32), menyebutkan bahwa penelitian deskriptif itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada saat tertentu. Jenis penelitian ini menjelaskan gambaran keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya, dalam hal ini menggambarkan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan.

2. Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah metode *desk study*, yaitu metode pengumpulan data berupa laporan-laporan hasil studi pustaka yang dapat diperoleh dari skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel, maupun jurnal. Aspek data yang diamati terdiri dari kondisi fisik dan biofisik Kota Baru satelit Mamminasata di Kec. Moncongloe, serta data-data terkait delapan indikator kota hijau.

Tahapan yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode *Gap Analysis*, yaitu analisis yang digunakan untuk membandingkan kondisi ideal dari suatu kota hijau dengan kondisi aktual di suatu kota. Kemudian dihasilkan data yang akan dianalisis secara deskriptif dan menghasilkan perbandingan kondisi Kota baru satelit Mamminasata di Kec. Moncongloe saat ini dengan penerapan ideal dari konsep kota hijau.

Tabel 3.1 Ringkasan Data Penelitian

No.	Aspek Penelitian	Data	Jenis Data	Sumber Data	Cara Pengambilan
1.	Kondisi Umum Kecamatan Moncongloe di Kabupaten Maros	Letak, Luas Wilayah, Batas administratif, Geologi, Topografi, Iklim, Tata Guna Lahan	Sekunder	Dinas PUPR Kabupaten Maros, RTRW Kabupaten Maros, Perda RDTR Kecamatan Moncongloe	Studi Pustaka
2.	Indikator "Green City" (Kota Hijau)	<i>Green planning and design, Green building, Green Community</i>	Primer, Sekunder	Survei Lapangan, Perda RDTR Kecamatan Moncongloe	Survei Lapangan, Studi Pustaka
3.	Aspek Sosial	Jumlah Penduduk	Sekunder	Buku BPS Moncongloe Dalam Angka	Studi Pustaka

Sumber: Jurnal Penelitian Evaluasi Penerapan Kota Hijau

D. Variabel Penelitian

Sugiyono (1999) dalam Sujarweni (2019:86), menjelaskan bahwa variabel penelitian merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Hatch dan Fardahany (1987) dalam Sujarweni (2019:86), secara teoritis variabel sendiri dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi suatu orang dengan yang lain atau suatu objek dengan objek yang lain.

Penggunaan jenis variabel sangat tergantung pada jenis rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Jenis rumusan masalah yang ingin di teliti dalam penelitian ini tergolong dalam jenis rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah yang sifatnya mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Rumusan Masalah Pertama dalam penelitian ini mencoba mengungkapkan seberapa besar keberhasilan penerapan konsep kota hijau, lalu rumusan masalah kedua meninjau apa saja kendala dalam penerapan konsep *Green city* di lokasi,

kemudian pada rumusan masalah ketiga menyusun strategi penerapan yang sustainable dan dapat mendukung pemenuhan kriteria dalam penerapan konsep kota hijau.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan variabel beserta indikatornya yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Variabel dan Indikator Penelitian

<i>Green City</i>	Definisi	Indikator/Parameter	Kondisi Lapangan	Hasil	Kendala	Solusi
<i>Green Planning and Design</i>	Perencanaan dan rancangan hijau adalah perencanaan tata ruang yang berprinsip pada konsep pembangunan kota berkelanjutan.	<i>Land Used</i> Luas RTH Kepadatan Penduduk	-	-	-	-

Tabel 3.4 Batasan penentuan skoring indikator *Green Planning and Design*

Penerapan (Program)	Skor				
	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
<i>Land Used</i>	1. Tidak ada rencana untuk pengembangan kota dengan menggunakan konsep <i>Land Used</i> kota hijau dan tidak tertera dalam RDTR.	1. Sudah ada arahan untuk pengembangan <i>Land Used</i> kota hijau, namun belum tertera dalam RDTR.	1. Sudah ada rencana untuk pengembangan <i>Land Used</i> kota hijau yang tertera dalam RDTR. 2. Sudah ada penerapan pada beberapa komponen pembentuk <i>Land Used</i> kota hijau (bangunan vertikal, penentuan KDH), serta adanya pengembangan jalur pejalan kaki di sekitarnya.	1. Sudah ada rencana untuk pengembangan <i>Land Used</i> kota hijau yang tertera dalam RDTR. 2. Sudah ada penerapan pada beberapa komponen pembentuk <i>Land Used</i> kota hijau (bangunan vertikal, penentuan KDH), serta adanya pengembangan jalur pejalan kaki di sekitarnya dan terintegrasi dengan jaringan transportasi umum.	1. Sudah ada rencana untuk pengembangan <i>Land Used</i> kota hijau yang tertera dalam RDTR. 2. Sudah ada penerapan dengan membentuk kawasan <i>Land Used</i> kota hijau 3. Adanya pengembangan jalur pejalan kaki di sekitar kawasan <i>Land Used</i> kota hijau dan terintegrasi dengan jaringan transportasi umum, serta dapat mengatasi masalah perkotaan terka
	2. Tidak ada penerapan	2. Sudah ada penerapan pada beberapa komponen pembentuk kota (bangunan vertikal, penentuan KDH), namun belum bertujuan untuk mengembangkan konsep <i>Land Used</i> kota hijau.	2. Sudah ada penerapan dengan usaha pengembangan produk properti (perkantoran, hotel, tempat tinggal).	2. Sudah ada penerapan dengan usaha pengembangan produk properti (perkantoran, hotel, tempat tinggal) dan pengembangan jalur pejalan kaki di sekitarnya.	
Mixed Use Planning	1. Belum ada rencana untuk pengembangan kota dengan menggunakan <i>mixed use development</i> dan tidak tertera dalam RDTR. 2. Tidak ada Penerapan	1. Sudah ada arahan untuk pengembangan <i>mixed use development</i> , namun belum tertera dalam RDTR. 2. Sudah ada usaha pengembangan produk properti, namun pengembangan belum bertujuan untuk membentuk kawasan <i>mixed used</i> .	1. Sudah ada rencana untuk pengembangan <i>mixed use development</i> yang tertera dalam RDTR. 2. Sudah ada penerapan dengan usaha pengembangan produk properti (perkantoran, hotel, tempat tinggal).	1. Sudah ada rencana untuk pengembangan <i>mixed use development</i> yang tertera dalam RDTR. 2. Sudah ada penerapan dengan usaha pengembangan produk properti (perkantoran, hotel, tempat tinggal) dan pengembangan jalur pejalan kaki di sekitarnya.	1. Sudah ada rencana untuk pengembangan <i>mixed use development</i> yang tertera dalam RDTR. 2. Sudah ada penerapan dengan usaha pengembangan produk properti (perkantoran, hotel, tempat tinggal) dan pengembangan jalur pejalan kaki di sekitarnya serta terintegrasi

Tabel 3.4 Batasan penentuan skoring indikator *Green Planning and Design*

Penerapan (Program)	Skor				
	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
					dengan jaringan transportasi umum.
Perencanaan Ruang Terbuka Hijau	1. Tidak ada rencana untuk pengembangan kota dengan menggunakan RTH dan tidak tertera dalam RDTR.	1. Sudah ada arahan untuk pengembangan RTH, namun belum tertera dalam RDTR.	1. Sudah ada rencana untuk pengembangan kawasan RTH yang tertera dalam RDTR.	1. Sudah ada rencana untuk pengembangan kawasan RTH yang tertera dalam RDTR.	1. Sudah ada rencana untuk pengembangan kawasan RTH yang tertera dalam RDTR.
	2. Tidak ada penerapan	2. Sudah ada penerapan dengan usaha RTH.	2. Sudah ada penerapan jalur untuk RTH, namun tanpa disertai dengan fasilitas pendukung yang memadai.	2. Terdapat di pusat kota dengan kegiatan intensitas tinggi. 3. Tersedia fasilitas pendukung untuk pejalan kaki.	2. Terdapat di pusat kota dengan kegiatan intensitas tinggi. 3. Sudah membentuk kawasan yang terintegrasi dengan tempat lain, serta tersedianya fasilitas pendukung untuk pejalan kaki.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan juga data kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini diantaranya meliputi data skoring dan persentase keberhasilan penerapan konsep kota hijau sedangkan data kualitatif yang digunakan merupakan data kualitatif yang digunakan merupakan deeskriptif dari dokumen rencana detail tata ruang Kota Baru Moncongloe.
2. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan langsung ke lapangan atau lokasi penelitian, sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi menyangkut penelitian ini

yang didapatkan dari berbagai instansi terkait, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun data penelitian yang tergolong dalam sumber data primer diantaranya adalah meliputi data materi teknis perencanaan, dokumen peraturan daerah RDTR Kota Baru Satelit Mamminasata di Kecamatan Moncongloe dan data statistik dalam menunjang skoring serta penghitungan persentase indikator kota hijau.



F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sesuai dengan permasalahan yang diteliti yakni *Green Planning and Design* yang merupakan salahsatu dari delapan muatan Indikator Kota Hijau yang disandingkan kepada dokumen Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Baru Mamminasata di Kecamatan Moncongloe, Dari hasil tersebut akan didapat hasil penelitian yang valid.

2. Analisis Sistem Informaasi Geospasial dengan Metode Interpretasi, Editing (Digitasi), dan *Overlay*

Geografi Informasi Sistem (GIS) atau yang kerap dikenal dengan sistem informasi geografis (SIG) merupakan suatu sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintergrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut (Gistut, 1994 dalam Adil, 2017). Analisis ini digunakan untuk melakukan pengolahan data citra satelit guna mengetahui transformasi spasial yang terjadi pada wilayah perkotaan Kecamatan Moncongloe. kemudian diolah dengan menggunakan perangkat aplikasi ArcGis 10.8 untuk membuat peta kondisi eksisting yang terjadi selama kurun waktu penelitian tersebut. Setelah proses interprestasi, digitasi, dan overlay dilakukan, kemudian akan di ekspor ke dalam bentuk peta JPG perubahan lahan dan database tabel untuk mengetahui bentuk dan besaran luas perubahan lahan yang terjadi di lokasi penelitian.

3. Analisis Bobot dan Skoring

a. Analisis Kuantitatif

Analisis yang dilakukan pada aspek kuantitatif menggunakan teknik normalisasi yang dikalikan dengan bobot indikator. Perhitungan aspek kuantitatif menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus perhitungan di bawah ini digunakan apabila nilai yang diperoleh semakin besar maka akan semakin baik/memiliki dampak positif pada lingkungan dan jika semakin kecil maka semakin buruk. (Amira, 2014)

Bobot Nilai (%) = ((Nilai yang diperoleh)/(Nilai Baku Mutu))x Bobot Indikator (%)

b. Analisis Kualitatif

Aspek Kualitatif akan dihitung menggunakan metode skoring. Metode ini merupakan metode *Expert Judgement* yang mengacu pada penelitian sebelumnya.

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

0 = ada rencana belum ada penerapan

1 = ada aturan belum ada penerapan / belum ada aturan sudah ada penerapan

2 = ada aturan dengan penerapan $\leq 50\%$

3 = ada aturan dengan penerapan $\geq 50\%$ namun belum selesai 100%

4 =

$$\text{Nilai Penerapan Total (Xt)} = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

aturan telah ditetapkan dan terealisasikan dengan baik.

Dimana :

Xt = nilai penerapan total bentuk penerapan setiap indikator

X1 = persentase bentuk penerapan indikator 1

Xn = persentase bentuk penerapan indikator ke-n

Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap nilai maksimal dari setiap indikator serta menghitung persentase dari penerapan setiap indikator dengan

$$\text{Nilai Maksimal (Xmax)} = \text{Jumlah Model Penerapan} \times \text{poin skoring maksimal}$$

$$\text{Persentase Penerapan Indikator (\%)} = \frac{\text{Nilai Penerapan Total}}{\text{Nilai Maksimal (Xmax)}} \times 100\%$$

rumusan sebagai berikut:

Setelah tahapan skoring ini dilakukan, maka dapat diketahui indikator apa saja yang sudah diterapkan dengan baik dan indikator apa saja yang belum diterapkan dengan baik di Kecamatan Moncongloe.

Sehingga dapat diketahui perlakuan atau rencana yang akan dilakukan selanjutnya untuk menciptakan *Green Planning and Design* yang ideal di Kecamatan Moncongloe. Berikut adalah tabel penentuan skoring indikator *Green city*.

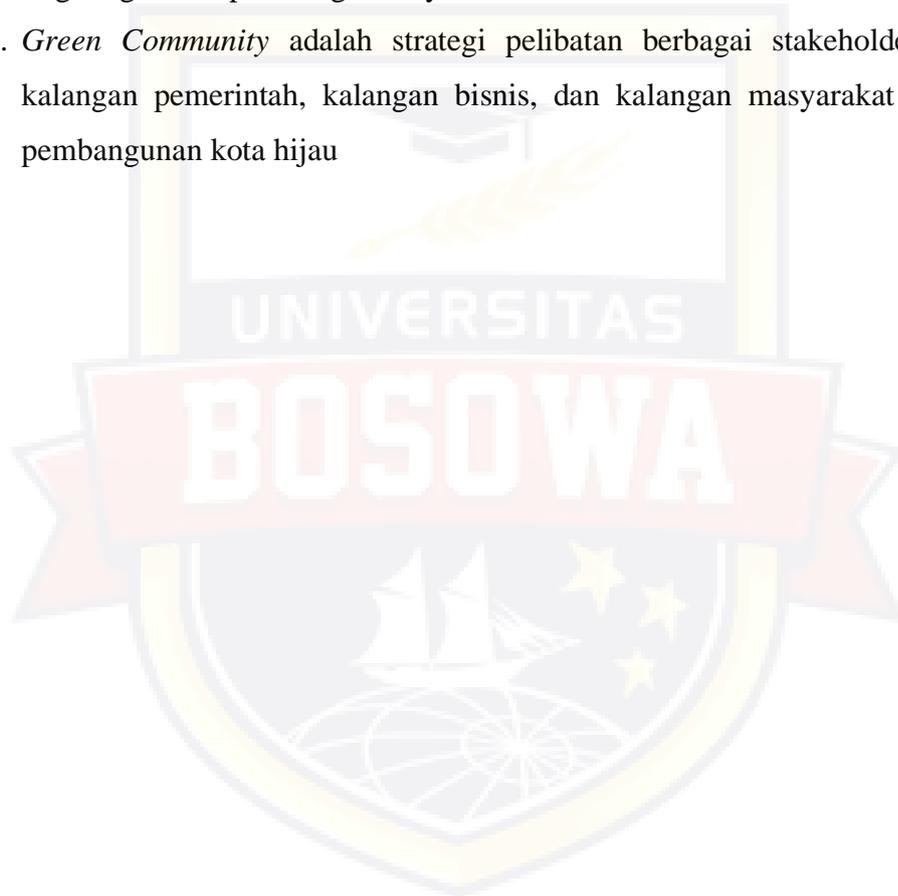
4. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif ini merupakan analisis yang bersifat naratif yang digunakan untuk menganalisis data dan menggambarkan berbagai kondisi serta situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dan dibobot kemudian dilakukan metode skoring sehingga dapat digunakan untuk merumuskan strategi pada penerapan konsep *Green City* di Kawasan Kota Baru Moncongloe. Oleh karena itu, dengan menggunakan analisis deskriptif ini diharapkan hasil dari penelitian yang akan dilakukan mampu menghasilkan suatu kesimpulan yang kuat dan akurat serta lebih informatif sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

G. Definisi Operasional

1. *Green City* adalah konsep perencanaan dan pengembangan kota hijau yang dicapai dengan konsep pembangunan seimbang.
2. *Green Planning and Design* atau perencanaan dan rancangan kota hijau adalah perencanaan tata ruang yang berprinsip pada konsep pembangunan kota berkelanjutan.
3. *Green Open Space* adalah ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu elemen penting penataan kota hijau.
4. *Green Waste* adalah pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada 3R (*Reuse, Redcue, Recycle*).
5. *Green Transportation* adalah pengelolaan transportasi umum hijau yang berfokus pada transportasi massal yang berkualitas.

6. *Green Water* adalah pengelolaan air yang ramah lingkungan, yang bertujuan untuk menghemat dalam penggunaan air.
7. *Green Energy* adalah strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui penghematan penggunaan serta peningkatan energi terbarukan.
8. *Green Building* adalah struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan dan pembangunannya bersifat efisien.
9. *Green Community* adalah strategi pelibatan berbagai stakeholder dari kalangan pemerintah, kalangan bisnis, dan kalangan masyarakat dalam pembangunan kota hijau



BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten

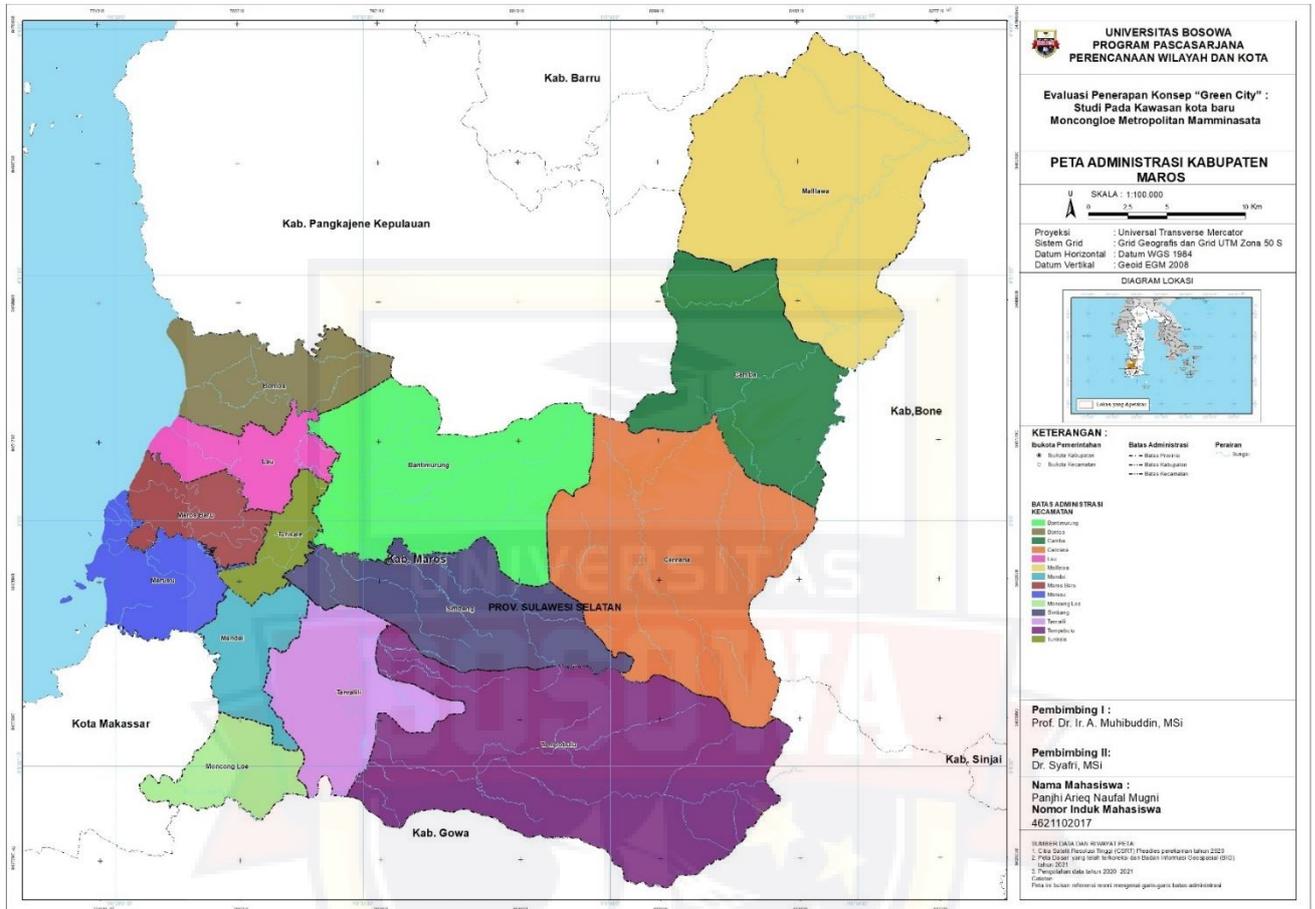
1. Letak Geografis dan Administrasi Kabupaten Maros

Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep di sebelah Utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa di sebelah Selatan, Kabupaten Bone di sebelah Timur dan Selat Makassar di sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Maros adalah 1.619,12 km² yang secara administrasi pemerintahannya terdiri dari 14 Kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan. (Maros Dalam Angka, 2019).

Tabel 4.1 Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Maros

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Mandai	49,11	3,03
2.	Moncongloe	46,87	2,89
3.	Maros Baru	53,76	3,32
4.	Marusu	53,73	3,31
5.	Turikale	29,93	1,84
6.	Lau	73,83	4,55
7.	Bontoa	93,52	5,77
8.	Bantimurung	173,70	10,72
9.	Simbang	105,31	6,50
10.	Tanralili	89,45	5,52
11.	Tompobulu	287,66	17,76
12.	Camba	145,36	8,97
13.	Cenrana	180,97	11,17
14.	Mallawa	235,92	14,57
Total		1.619,12	100

Sumber: Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2021



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaen Maros

2. Kondisi Fisik dan Lingkungan

a. Kondisi Topografi

Kondisi Topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi mulai dari datar, berbukit, sampai bergunung. Hampir semua wilayah Kabupaten Maros merupakan daerah dataran dengan luas keseluruhan sekitar 43,8 persen dari total wilayah Kabupaten Maros. Sedangkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng diatas 40 persen atau wilayah bergunung-bergunung mempunyai luas sebesar 30,8 persen dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam buku Kabupaten Maros dalam Angka Tahun 2021 dapat dilihat berdasarkan tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Tinggi wilayah diatas permukaan laut menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2021

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi (meter)
1.	Mandai	Tetebatu	5-65
2.	Moncongloe	Moncongloe Bulu	10-122
3.	Maros Baru	Baju Bodoa	0-10
4.	Marusu	Temmapadae	5-35
5.	Turikale	Pettuadae	0-20
6.	Lau	Macini Baji	5-38
7.	Bontoa	Panjalingan	15-187
8.	Bantimurung	Kalabirang	50-700
9.	Simbang	Jene Taesa	15-350
10.	Tanralili	Borong	20-450
11.	Tompobulu	Pucak	50-340
12.	Camba	Cempaniga	75-881
13.	Cenrana	Bengo	654-639
14.	Mallawa	Ladange	100-800

Sumber: Kabupaten Maros dalam angka tahun 2021.

b. Iklim

Berdasarkan pencatatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) rata-rata suhu udara Kabupaten Maros adalah 27,22° C setiap bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah 23,1⁰

C (Terjadi pada bulan Juli dan Agustus) sedangkan paling tinggi adalah 33,5⁰ C (Terjadi pada bulan September).

Penyinaran matahari selama tahun 2019 rata-rata berkisar 66,67%. Secara geografis daerah ini terdiri dari 10% (10 desa) adalah pantai (5% desa) adalah kawasan lembah, 27% (28 desa) adalah lereng/bukit dan 58% (60 desa) adalah dataran.

Tabel 4.3 Rata-Rata suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Maros Tahun 2021

No.	Bulan	Suhu Udara Temperatur (°C)			Kelembaban Udara (%)		
		Maks.	Min.	Rata-Rata	Maks.	Min.	Rata-rata
1.	Januari	30,0	24,6	26,8	96	68	85
2.	Februari	29,6	24,1	26,1	97	76	89
3.	Maret	30,4	24,1	26,6	96	71	86
4.	April	31,7	24,6	27,6	94	57	81
5.	Mei	32,1	25,2	28,1	94	59	78
6.	Juni	30,9	24,5	27,0	93	60	83
7.	Juli	31,1	23,1	26,6	92	49	77
8.	Agustus	32,3	23,1	27,2	75	56	72
9.	September	33,5	22,8	27,9	78	31	65
10.	Oktober	33,1	23,6	28,1	92	48	71
11.	November	31,7	24,4	27,8	97	67	82
12.	Desember	30,3	24,2	26,8	96	68	85

Sumber: Kabupaten Maros dalam angka 2021

Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata sekitar 284,5 mm setiap bulannya dengan jumlah hari hujan berkisar 185 hari, dengan rata-rata suhu udara 24,25⁰C dan rata-rata suhu udara maksimum 32⁰ C. Pada Bulan Desember curah hujan menyentuh angka 777 mm³, dimana ini merupakan curah hujan tertinggi di tahun 2019, sebelumnya di Bulan November curah hujan hanya mencapai 450 mm³, dan yang terendah yaitu di Bulan Agustus dengan curah hujan 28 mm³. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.4 berikut;

Tabel 4.4 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Januari	530	24
Februari	587	25
Maret	276	20
April	331	17
Mei	86	19
Juni	163	15
Juli	75	12
Agustus	28	3
September	94	5
Oktober	101	14
November	450	27
Desember	777	23

Sumber: Kabupaten Maros dalam angka Tahun 2021.

c. Kependudukan

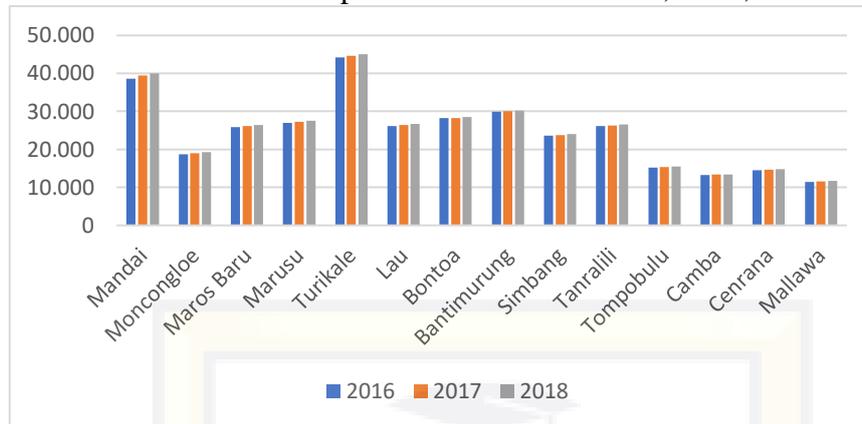
Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 berjumlah 319.008 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 43.378 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale. Berdasarkan hasil proyeksi, penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2021 sebanyak 349.822 jiwa.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2016, 2017, dan 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per-Tahun	
		2016	2017	2018	2016-2017	2017-2018
1.	Mandai	38.628	39.414	40.005	1,06	1,50
2.	Moncongloe	18.671	19.052	19.337	1,06	1,50
3.	Maros Baru	25.870	26.167	26.444	1,06	1,06
4.	Marusu	27.035	27.277	27.531	1,06	0,93
5.	Turikale	44.242	44.621	45.028	1,06	0,91
6.	Lau	26.101	26.401	26.680	1,06	1,06
7.	Bontoa	28.179	28.312	28.515	1,06	0,72
8.	Bantimurung	29.861	30.036	30.268	1,06	0,77
9.	Simbang	23.667	23.825	24.019	1,06	0,81
10.	Tanralili	26.101	26.291	26.513	1,06	0,84
11.	Tompobulu	15.186	15.350	15.507	1,06	1,02
12.	Camba	13.303	13.362	13.456	1,06	0,70
13.	Cenrana	14.580	14.716	14.856	1,05	0,95
14.	Mallawa	11.466	11.559	11.663	1,06	0,90
	Total	342.890	346.383	349.822	1,06	0,99

Sumber: Kabupaten Maros dalam Angka Tahun 2019

Diagram 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2016, 2017, dan 2018



Sumber: Kabupaten Maros dalam Angka Tahun 2019

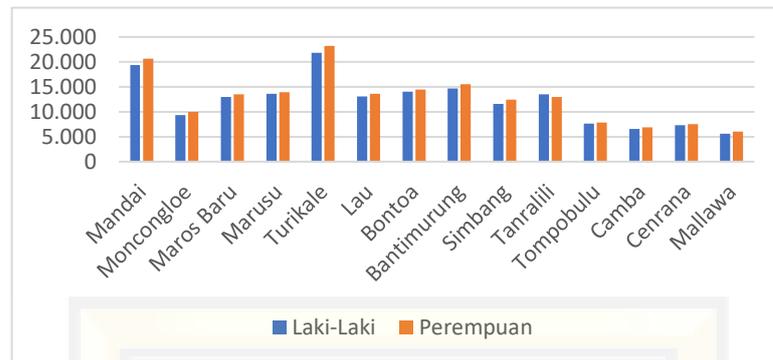
Secara umum, keterbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan (*sex ratio*), perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan 96 laki-laki dibanding 100 perempuan. Namun di Kecamatan Tanralili, rasio jenis kelamin laki-laki lebih besar dari 100, hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di kecamatan tersebut lebih besar dari penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Turikale, 1.504 jiwa/km². Sedangkan yang terendah di kecamatan mallawa, 49 jiwa/km².

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Mandai	19.318	20.687	40.005	93,38
2.	Moncongloe	9.320	10.017	19.337	93,04
3.	Maros Baru	12.949	13.495	26.444	95,95
4.	Marusu	13.651	13.880	27.531	98,35
5.	Turikale	21.791	23.237	45.028	93,78
6.	Lau	13.049	13.631	26.680	95,73
7.	Bontoa	14.044	14.471	28.515	97,05
8.	Bantimurung	14.720	15.548	30.268	94,67
9.	Simbang	11.614	12.405	24.019	93,62
10.	Tanralili	13.498	13.015	26.513	103,71
11.	Tompobulu	7.637	7870	15.507	97,04
12.	Camba	6.606	6.850	13.456	96,44
13.	Cenrana	7.290	7.566	14.856	96,35
14.	Mallawa	5.630	6033	11.663	93,32
Total		171.117	178.705	349.822	95,75

Sumber: Kabupaten Maros dalam angka tahun 2019

Diagram 4.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2019



2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Moncongloe

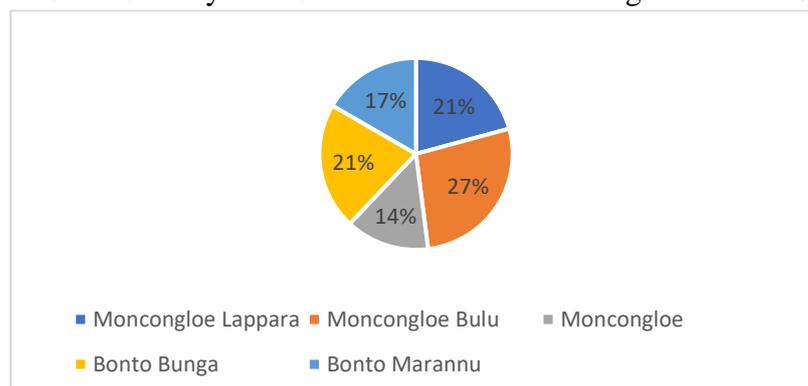
Kecamatan Moncongloe merupakan salahsatu dari 14 Kecamatan yang berada di Kabupaten Maros, Luas Kecamatan Moncongloe sekitar 46,87 Km² Serta berada pada ketinggian 500 mdpl, Ibu Kota Kecamatan ini berada di Kelurahan Pamanjengan, Adapun Pusat Ibukota Kecamatan berada pada jarak 22 Km dari pusat Kota di Kecamatan Turikale yang merupakan Ibu kota kabupaten dan pusat pemerintahan, Kecamatan Moncongloe berbatasan langsung dengan Kota Makassar di sebelah barat, Kecamatan Tanralili di sebelah timur, Kecamatan Mandai di sebelah Utara dan Kabupaten Gowa di Sebelah Selatan. (Buku BPS Kecamatan Moncongloe dalam angka Tahun 2018).

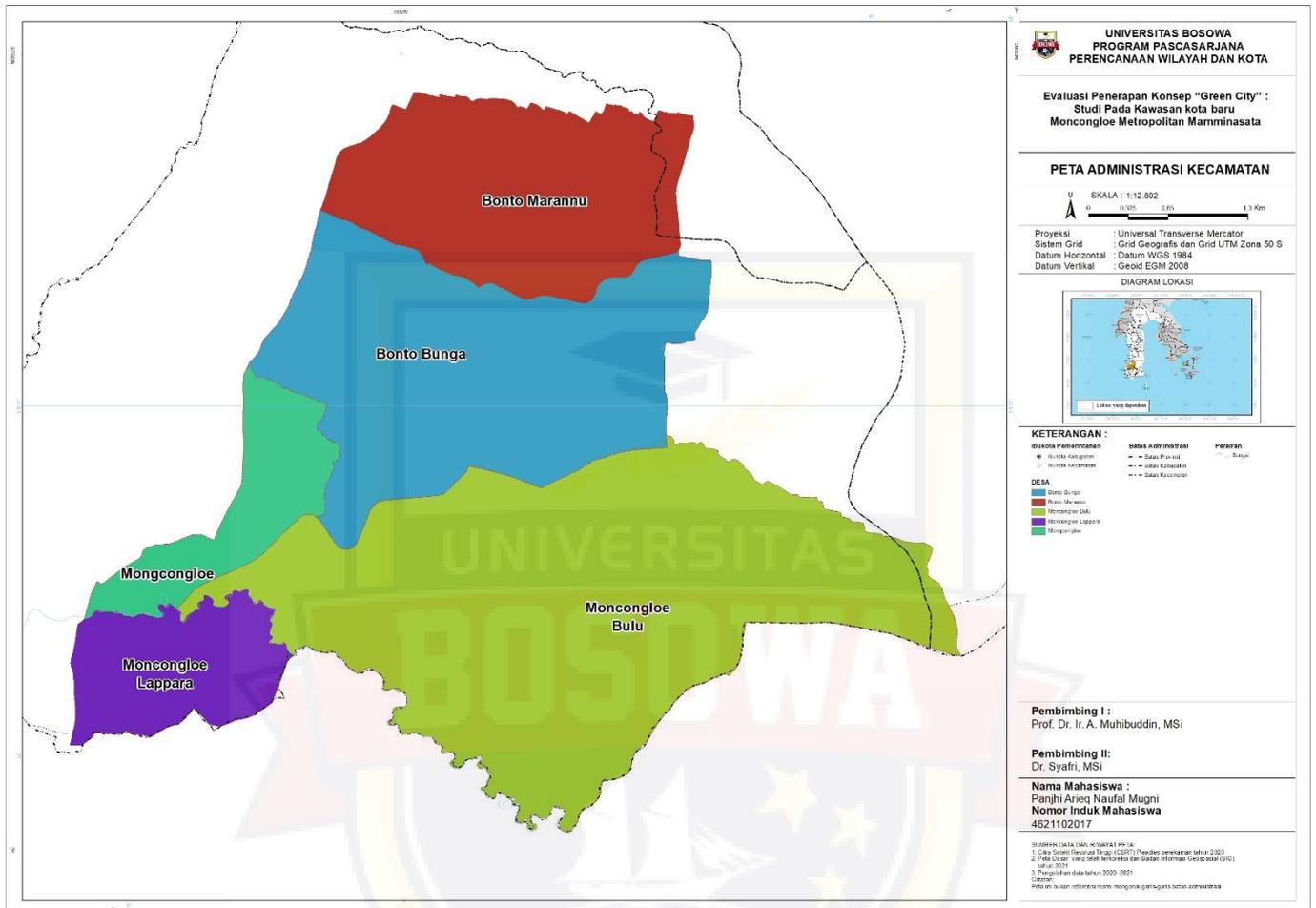
Tabel 4.7 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Moncongloe Tahun 2019

No.	Desa	Luas (Km ²)
1	Moncongloe Lappara	9,73
2	Moncongloe Bulu	12,76
3	Moncongloe	6,58
4	Bonto Bunga	10,02
5	Bonto Marannu	7,78
Jumlah		46,87

Sumber: Kecamatan Moncongloe dalam angka tahun 2019

Diagram 4.3 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Moncongloe Tahun 2019





Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Moncongloe

a. Kondisi Fisik dan Lingkungan

1) Kondisi Topografi

Kondisi Topografi Kecamatan Moncongloe merupakan daerah bukan pantai yang berbentuk dataran. Dari lima daerah wilayah administrasi yang ada, semuanya berstatus desa dengan topografi dataran rendah, serta ketinggian rata-rata lima ratus meter di atas permukaan laut. Sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8 Jenis Topografi di Kecamatan Moncongloe Tahun 2021

Desa	Pantai	Bukan Pantai		
		Lembah	Punggung Bukit	Dataran
Moncongloe Lappara	-	-	-	✓
Moncongloe Bulu	-	-	-	✓
Moncongloe	-	-	-	✓
Bonto Bunga	-	-	-	✓
Bonto Marannu	-	-	-	✓
Jumlah	-	-	-	5

Sumber: Kecamatan Moncongloe dalam angka tahun 2021

b. Kependudukan

Berdasarkan data dari Tahun 2021, luas keseluruhan Kecamatan Moncongloe adalah 46,87 Km², dengan kepadatan penduduk yang mencapai 406 Jiwa/km². Penduduk Kecamatan Moncongloe berjumlah 19.052 jiwa, dengan Rumah Tangga berjumlah 4.215 rumah tangga. Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Desa Moncongloe Lappara yaitu, 835 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya, sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel 4.9. berikut:

Tabel 4.9 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Moncongloe Tahun 2021

Desa	Luas (Km ²)	Rumah Tangga	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Moncongloe Lappara	9,73	1810	8122	835
Moncongloe Bulu	12,76	805	3820	299
Moncongloe	6,58	657	3292	500
Bonto Bunga	10,02	404	1355	135
Bonto Barannu	7,78	539	2463	317
Jumlah	46,87	4215	19052	406

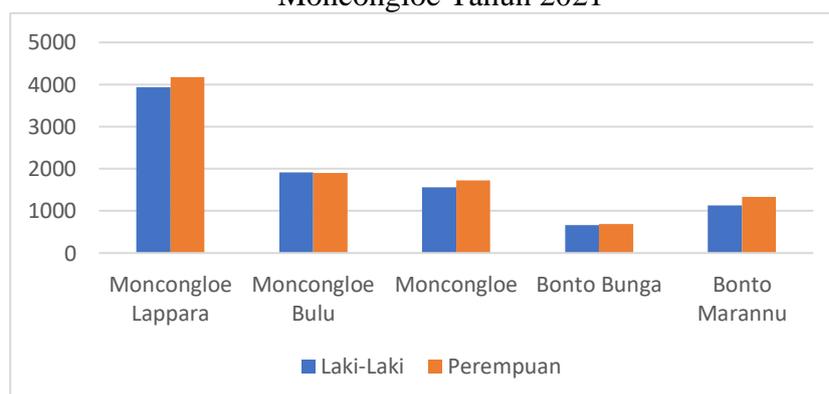
Sumber: Kecamatan Moncongloe dalam angka tahun 2021

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Kecamatan Moncongloe adalah terdapat 94 penduduk laki-laki di setiap 100 perempuan. Namun, Berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, piramida penduduk di Kecamatan Moncongloe berbentuk kelompok muda (*Expansive*), piramida ini berbentuk segitiga yang mengecil di ujung atas, dapat disimpulkan bahwa kelompok umur muda yang relatif lebih banyak daripada kelompok umur yang lebih tua. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* di Kecamatan Moncongloe Tahun 201

Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	<i>Sex Ratio</i>
Moncongloe Lappara	3941	4181	8122	82
Moncongloe Bulu	1917	1903	3820	101
Moncongloe	1566	1726	3292	91
Bonto Bunga	664	691	1355	96
Bonto Marannu	1133	1330	2463	85
Jumlah	9221	9831	19052	94

Sumber: Kecamatan Moncongloe dalam angka tahun 2021

Diagram 4.4 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* di Kecamatan Moncongloe Tahun 2021

Tabel 4.11 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* di Kecamatan Moncongloe Tahun 2021

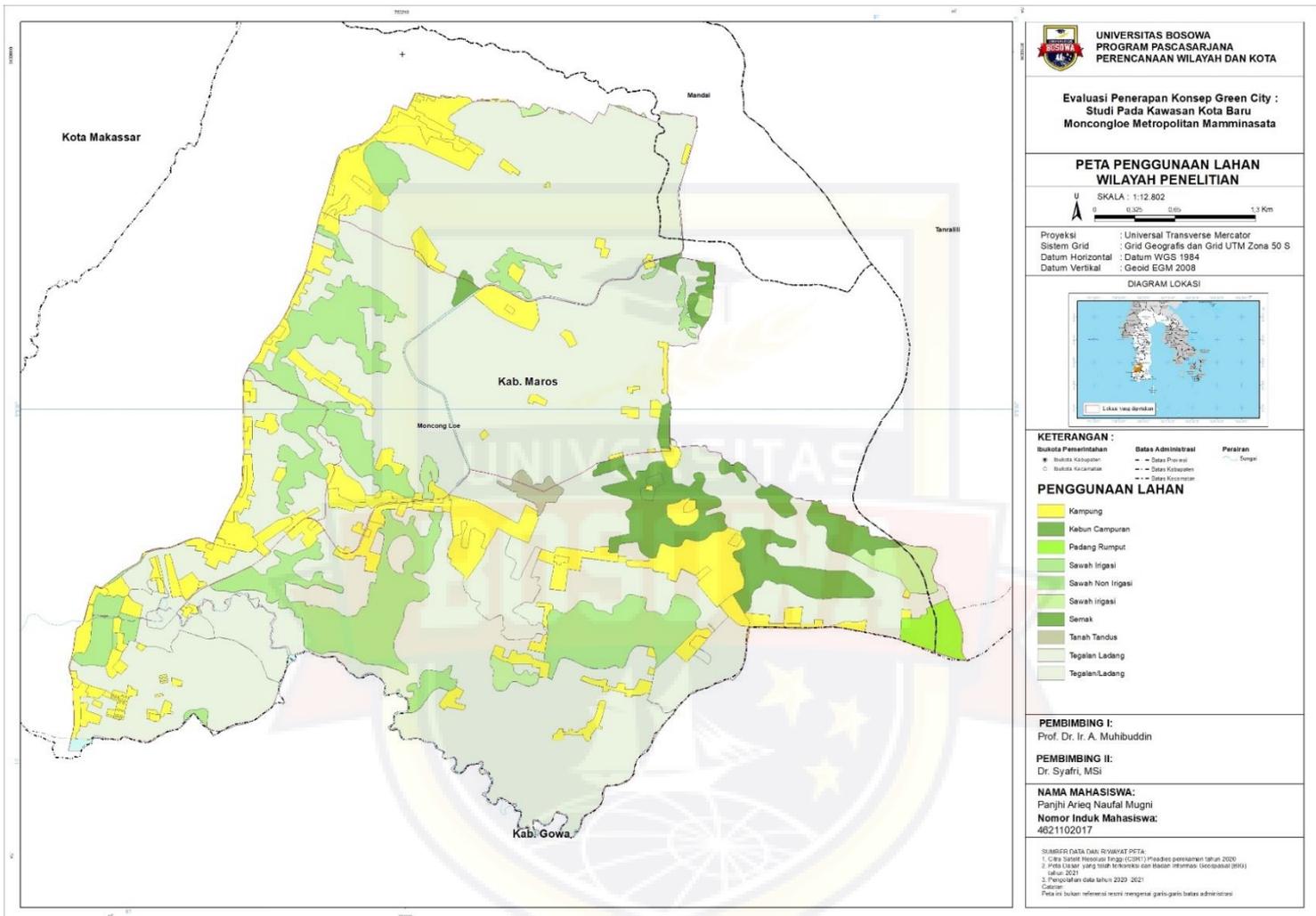
No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	1191	1237	2428
2	5- 9	1070	964	2034
3	10 - 14	762	802	1564
4	15 - 19	812	776	1588
5	20 - 24	916	929	1845
6	25 - 29	771	939	1710
7	30 - 34	819	932	1751
8	35 - 39	758	819	1577
9	40 - 44	655	645	1300
10	45 - 49	459	463	922
11	50 - 54	322	369	691
12	55 - 59	245	277	522
13	60 - 64	153	218	371
14	65 - +69	288	461	749
Jumlah		9221	9831	19052

Sumber: Kecamatan Moncongloe dalam angka tahun 2021

c. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Luas seluruh desa di Kecamatan Moncongloe adalah 4.686,72 Ha, pada umumnya kondisi lahan sawah di desa Moncongloe Lappara seluas 138,90 ha (15,91%), Moncongloe Bulu 21,31 Ha (1,67%), Desa Moncongloe dibanding dengan kedua desa sebelumnya, luas lahan sawah yang diusahakan untuk pertanian lebih luas yaitu sekitar 245,80 (37,36%). Sementara untuk desa Bonto Bunga luas lahan sawah tadah hujan sekitar..156,00 (15,57%), sedangkan Bonto Marannu luas lahan sawah yang diusahakan..untuk pertanian tadah hujan seluas 262,38 (33,72%). Sektor pertanian khususnya padi sawah masih menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk di Kecamatan Moncongloe.

Berikut dibawah ini merupakan data penggunaan lahan persawahan di setiap desa yang ada di Kecamatan Moncongloe Tahun 2021



Gambar 4.3 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Moncongloe

Tabel 4.12 Penggunaan lahan sawah per-desa
Di Kecamatan Moncongloe Tahun 2021

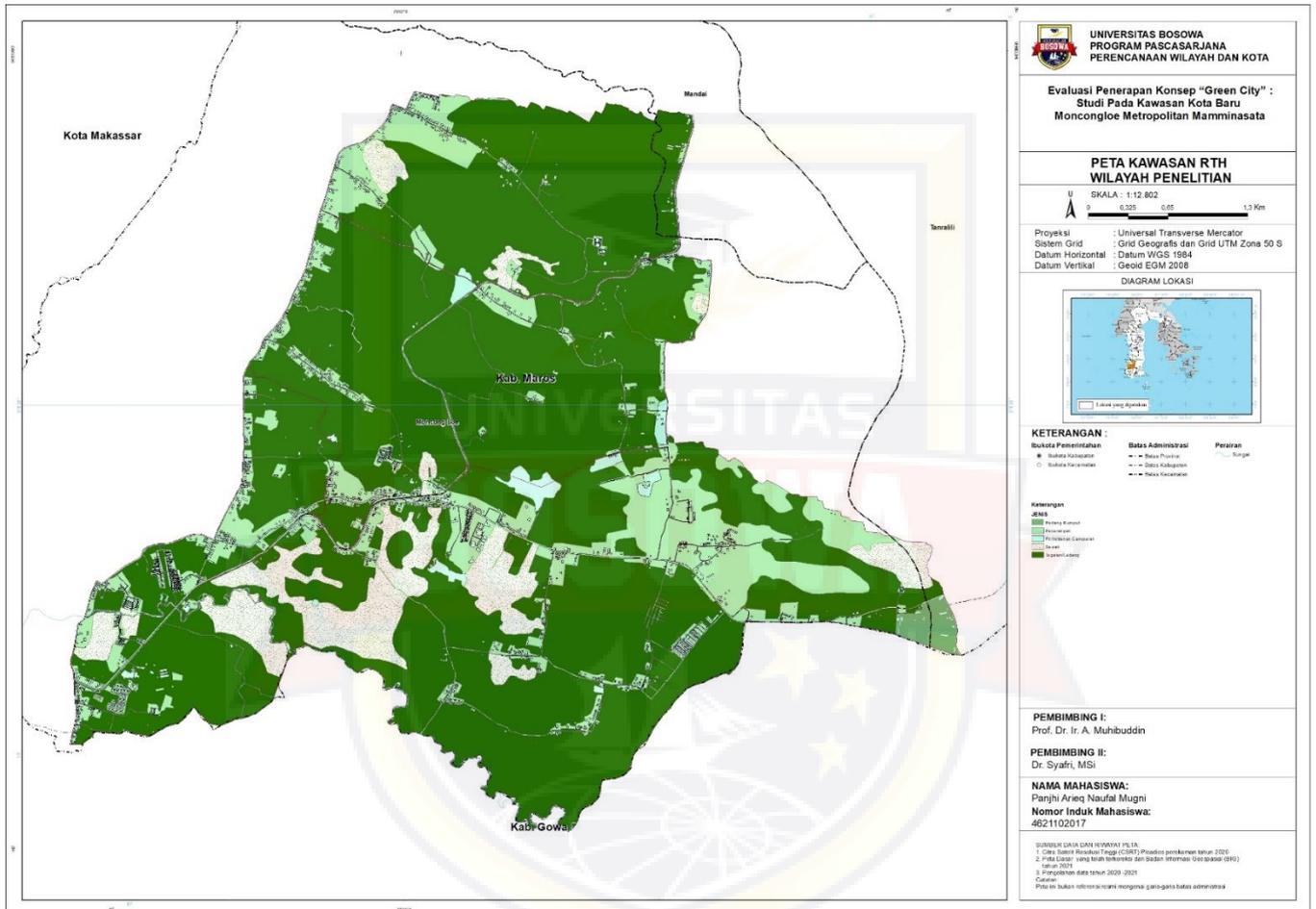
Desa	Luas (Ha)	Persentase (%)
Moncongloe Lappara	138,90	15,91
Moncongloe Bulu	21,31	1,67
Moncongloe	245,80	37,36
Bonto Bunga	156,00	15,57
Bonto Marannu	262,38	33,72
Jumlah	824,39	100

Sumber: Kecamatan Moncongloe dalam angka tahun 2021

d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Moncongloe

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Zona RTH Kota seluas kurang lebih 328,43 (tiga ratus dua puluh delapan koma empat puluh tiga), terdiri atas:

- a. hutan kota;
- b. taman kota;
- c. taman kecamatan;
- d. taman kelurahan;
- e. taman RW;
- f. taman RT;
- g. pemakaman; dan
- h. jalurhijau



Gambar 4.4 Peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Moncongloe

e. Jaringan Transportasi

1) Angkutan Umum

Angkutan umum adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum. Umumnya di Kecamatan Moncongloe terdapat 3 jenis angkutan umum, yaitu mikrolet, truk, dan delman/bendi, dengan truk sebagai angkutan umum terbanyak di kecamatan ini, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.13 berikut;

Tabel 4.13 Banyaknya Angkutan Umum di Kecamatan Moncongloe, Tahun 2021

Desa	Taxi	Mikrolet	Truk	Delman/ Bendi	Becak	Perahu
Moncongloe Lappara	-	45	47	-	-	-
Moncongloe Bulu	-	11	68	2	-	-
Moncongloe	-	9	50	-	-	-
Bonto Bunga	-	3	37	2	-	-
Bonto Marannu	-	7	46	3	-	-
Jumlah	0	75	248	7	0	0

Sumber: *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Moncongloe*

2) Jaringan Jalan

Jaringan jalan kolektor primer sepanjang kurang lebih 17,27 (tujuh belas koma dua puluh tujuh) Kilometer;

Jaringan jalan kolektor sekunder sepanjang sepanjang kurang lebih 38,91 (tiga puluh delapan koma Sembilan puluh satu) Kilo Meter;

Jaringan jalan lokal primer kurang lebih 83,78 (delapan puluh tiga koma tujuh puluh delapan) Kilo Meter;

Jaringan jalan lokal sekunder sepanjang kurang lebih 61,96 (enam puluh satu koma Sembilan puluh enam) Kilo Meter;

Jalur pejalan kaki yang terletak di sebelah kanan dan kiri kolektor primer dan kolektor sekunder sepanjang kurang lebih 20,68 (dua puluh koma enam puluh delapan) Kilo Meter.

Jalur pesepeda yang terletak di sebelah kanan dan kiri kolektor primer dan kolektor sekunder sepanjang kurang lebih 20,68 (dua puluh koma enam puluh delapan) Kilo Meter;

Tabel 4.14 Panjang Jalur Transportasi
Di Kecamatan Moncongloe Tahun 2021

Jenis Jalan	Panjang Jalur (Km)
Kolektor Primer	17,27
Kolektor Sekunder	38,91
Lokal Primer	83,78
Lokal Sekunder	61,96
Jalur Pejalan Kaki	20,68
Jalur Pesepeda	20,68
Jalur Bus Rapid Transit (BRT)	5,37
Jumlah	248,65

Sumber: Perda RDTR Kecamatan Moncongloe

B. Analisis Muatan Indikator Kota Hijau

Perencanaan dan perancangan merupakan aspek penting dalam menata suatu kawasan perkotaan. Perencanaan dan perancangan yang baik akan menciptakan kota yang nyaman untuk dihuni. Perencanaan memiliki ruang lingkup yang luas sedangkan perancangan lebih kepada pengaturan aspek yang paling sederhana dari suatu perencanaan. Idealnya sebuah kota harus memiliki perencanaan dan perancangan kota yang berbasis kepada tiga hal, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Ketiga hal tersebut merupakan prinsip pengembangan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kota yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan.

Green planning and design dalam konteks hirarki penataan ruang yang berlaku di Indonesia pada dasarnya memberikan nuansa atau warna terhadap isi atau konten yang ada dalam dokumen rencana yang dibuat oleh daerah yang bersangkutan, mulai dari rencana umum sampai dengan rencana rinci. Tingkatan rencana yang harus ada pada suatu *green planning and design* yang dibuat dalam suatu rencana terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Detail Engineering Desain (DED), serta Masterplan RTH. Dimana di setiap rencana

tersebut memuat konsep pengembangan green planning and design yang akan dilakukan di setiap kota.

Kondisi Ideal *Green Planning and Design* Bentuk atau model dari *Green Planning and Design* yang idealnya dapat diterapkan pada suatu kota diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Compact City*

Menurut Cowan (2004) dalam Kustiwan (2006), *compact city* didefinisikan sebagai suatu pendekatan perencanaan kota yang didasarkan pada pengembangan secara intensif dalam kawasan perkotaan eksisting atau pada kota dengan kepadatan yang relatif tinggi, dengan membatasi pertumbuhannya. Menurut Kustiwan (2006) model *compact city* dinilai sebagai bentuk perkotaan yang paling berkelanjutan karena paling sesuai dengan prinsip anti-sprawl. Konsep ini menekankan pada usaha untuk mengurangi atau mengendalikan perluasan area kota yang diakibatkan oleh urban sprawl.

Menurut J. Arbury (2005), *compact city* merupakan sebuah model pengembangan kota yang terfokus pada intensifikasi perkotaan, menetapkan batas pertumbuhan kota, mendorong pengembangan campuran (*mixed used*) dan mengedepankan peran angkutan umum dan kualitas desain perkotaan.

Selain itu konsep ini pun mengusahakan untuk melakukan simbiosis antara alam dan populasi tinggi, misalnya dengan pengembangan bangunan vertikal sehingga kebutuhan akan RTH dapat dipenuhi. Beberapa negara maju yang telah menerapkan konsep ini adalah Jepang di kota Tokyo dan Kobe. Di kota tersebut telah dibuktikan bahwa untuk satu node *compact city* dapat direduksi sekitar 30% dampak dari permasalahan *urban sprawl*.

2. *Mixed-Use Development*

Mixed-Use Development adalah pembangunan kawasan multifungsi dimana dalam suatu kawasan terdapat banyak jenis kegiatan. Dalam satu kawasan tersebut dibangun minimal dua fungsi kawasan. Konsep ini lebih kepada usaha pengembangan produk properti (produk perkantoran, hotel, tempat tinggal, komersial, dll) yang dikembangkan menjadi satu kesatuan atau minimal dua

produk properti yang dibangun dalam satu kesatuan. *Mixed-Use Development* perlu dikembangkan untuk mengurangi waktu dan mobilisasi kendaraan untuk pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dengan demikian jumlah kendaraan di jalan dapat dikurangi sehingga dapat mengurangi kemacetan, selain itu secara pribadi dapat mengurangi penggunaan bahan bakar, menghemat waktu, serta mengurangi emisi.

3. Kawasan Pejalan Kaki

Kawasan pejalan kaki adalah suatu kawasan khusus bagi pejalan kaki, biasanya ditempatkan di kawasan tempat bermain anak, di pusat perbelanjaan yang sebelumnya dibuka untuk lalu lintas kendaraan kemudian ditutup untuk lalu lintas kendaraan. Pada kasus-kasus tertentu ada kawasan pejalan kaki yang membolehkan bus atau trem untuk tetap bisa masuk. Kawasan pejalan kaki biasanya dilengkapi dengan kursi, patung, taman atau fasilitas pejalan kaki lainnya.

4. *Transit Oriented Development* (TOD)

Transit Oriented Development (TOD) merupakan salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran serta memaksimalkan penggunaan angkutan massal seperti *busway* (BRT), kereta api kota (MRT), kereta api ringan (LRT), serta dilengkapi jaringan pejalan kaki atau sepeda. Dengan demikian perjalanan akan didominasi dengan menggunakan angkutan umum yang terhubung langsung dengan tujuan perjalanan. Berdasarkan penerapan TOD di beberapa kota besar menunjukkan penurunan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, karena adanya pilihan yang cepat, murah dan mudah mencapai tujuan dengan hanya berjalan kaki, menggunakan angkutan umum, masyarakat tidak perlu repot mencari tempat parkir, membayar biaya parkir yang tinggi, dan biaya operasi yang tinggi pula

a. *Green Planning and design*

Untuk mewujudkan kota hijau maka pada penerapan beberapa model perencanaan dan perancangan kota yang ada pun harus diimplementasikan dan terintegrasi secara baik dalam segala aspek. Selain adanya konsep WP

yang lebih memfokuskan pada pencegahan kepadatan kegiatan di pusat kota, maka perlu juga dikembangkan kawasan perencanaan dengan penggunaan campuran, pengaturan kawasan permukiman dan lainnya. Berikut ini adalah tabel evaluasi penerapan konsep *green planning and design* di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

5. Kondisi Aktual Kawasan Kota Baru Moncongloe

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Moncongloe tahun 2020–2040 menyebutkan bahwa aspek perencanaan dan perancangan Kota Baru Moncongloe lebih mengarah kepada kebijakan dan strategi dalam penataan ruang kota.

Penataan ruang yang dibuat diharapkan dapat mewujudkan tata ruang yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kota jasa yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dalam perencanaan kotanya, Kota Baru Moncongloe berfokus kepada pembuatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Kebijakan penataan struktur ruang bertujuan untuk:

- 1) mendistribusikan pelayanan kegiatan kepada masyarakat serta untuk mengurangi pergerakan penduduk ke pusat kota,
- 2) meningkatkan pelayanan transportasi darat meliputi aspek jaringan jalan, sistem pergerakan, pelayanan angkutan umum, terminal baik terminal penumpang maupun barang,
- 3) pengembangan jaringan utilitas terpadu, dan
- 4) penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Sedangkan kebijakan penataan pola ruang bertujuan untuk menetapkan dan melindungi kawasan–kawasan lindung serta mengoptimalkan ruang budidaya untuk mendorong pertumbuhan sosial ekonomi.

Rencana struktur ruang mengembangkan konsep sistem pelayanan yang ditetapkan melalui pembagian Wilayah Pelayanan (WP) serta pengembangan sistem Pusat Pelayanan yang terdiri dari 1 Pusat Pelayanan Kota yang terletak di Desa Moncongloe Bulu, 3 Sub Pusat Pelayanan Kota dan 5 Pusat Lingkungan.

Penetapan WP dimaksudkan untuk mendistribusikan pelayanan kegiatan kepada masyarakat serta untuk mengurangi pergerakan penduduk ke pusat kota. Pembagian wilayah pelayanan tersebut dibagi menjadi 5 WP yaitu:

- a. sebagian Desa Moncongloe Lappara dengan luas kurang lebih 146,89 (seratus empat puluh enam koma delapan sembilan) hektar;
- b. sebagian Desa Moncongloe dengan luas kurang lebih 253,46 (dua ratus lima puluh tiga koma empat enam) hektar;
- c. sebagian Desa Bonto Marannu dengan luas kurang lebih 314,88 (tiga ratus empat belas koma delapan delapan) hektar;
- d. sebagian Desa Bonto Bunga dengan luas kurang lebih 542,34 (lima ratus empat puluh dua koma tiga empat) hektar; dan
- e. sebagian Desa Moncongloe Bulu dengan luas kurang lebih 908,30 (sembilan ratus delapan koma tiga nol) hektar.

Untuk masing–masing WP, ditetapkan arahan pengembangan yang berbeda sesuai dengan karakteristik, kecenderungan perkembangan dan harapan yang ingin dicapai dari masing–masing WP tersebut. Arahan masing–masing WP adalah sebagai berikut.

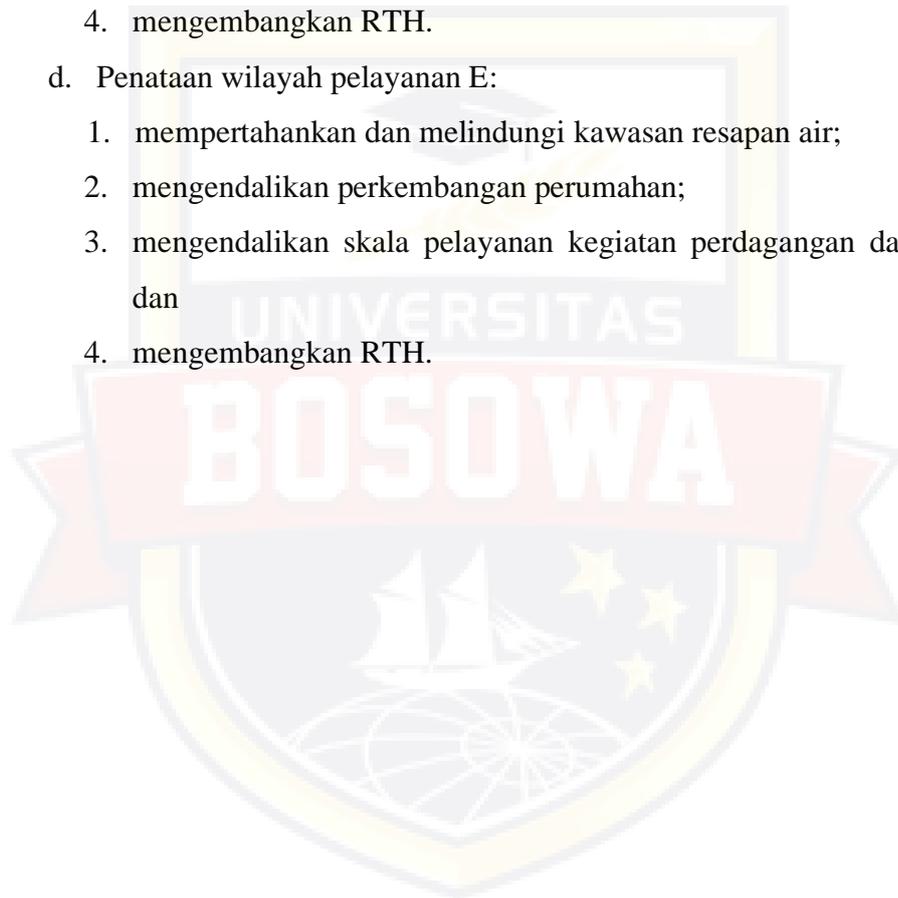
- a. Penataan perkembangan di wilayah pelayanan A:
 1. membatasi perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa primer;
 2. mengembangkan RTH;
 3. merevitalisasi pusat kota dengan tetap memperhatikan visi kota; dan
 4. mengendalikan perkembangan kegiatan perumahan.
- b. Penataan perkembangan di wilayah pelayanan B:
 1. mengendalikan perkembangan perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang;
 2. mengendalikan skala pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. mengembangkan RTH kota;
 4. mempertahankan dan melindungi kawasan resapan air; dan
 5. mempertahankan lahan pertanian kota yang ada.

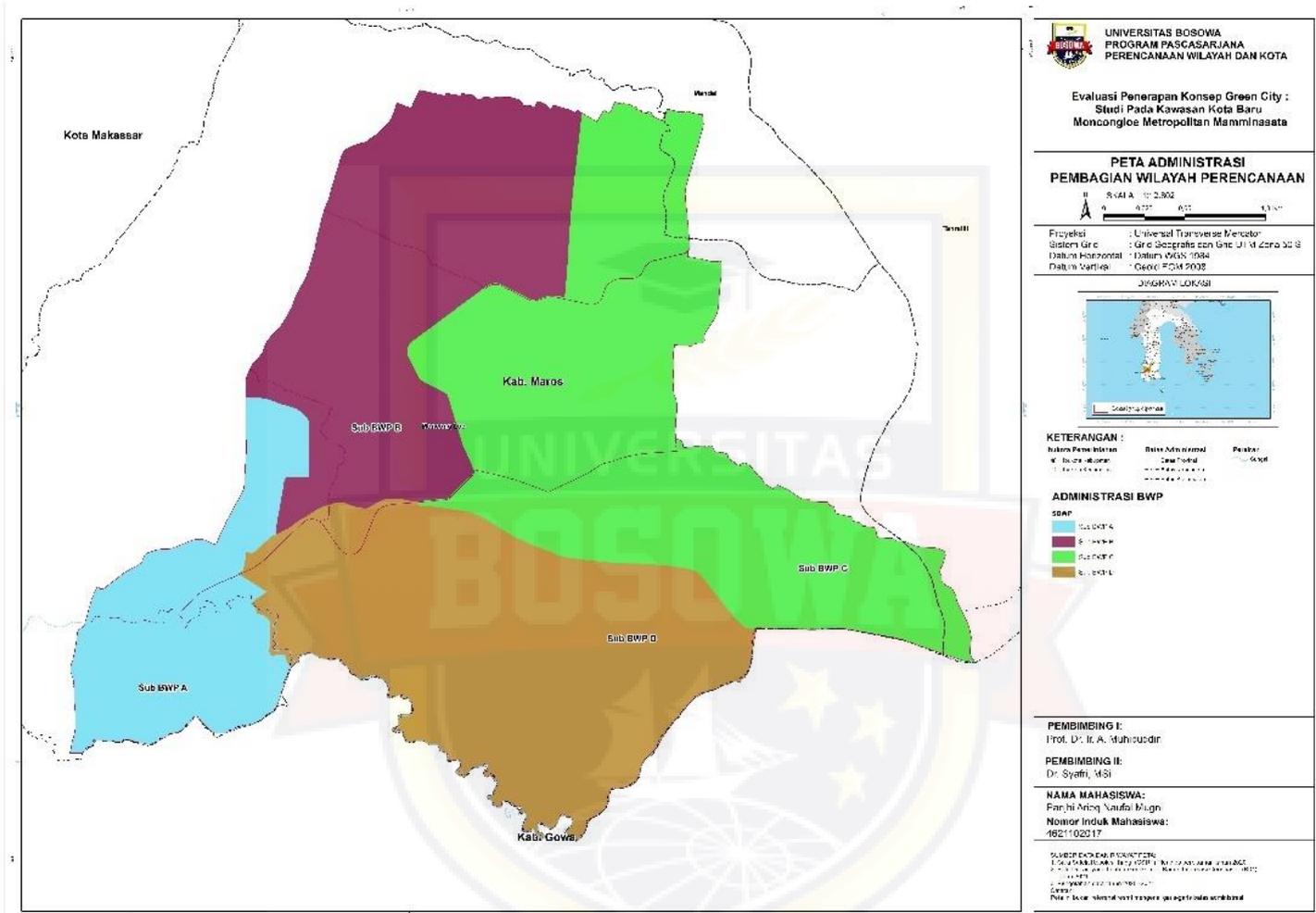
c. Penataan perkembangan di wilayah pelayanan C dan D Kota Baru Moncongloe:

1. mengembangkan perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang masing-masing kawasan;
2. mengendalikan skala pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa;
3. meningkatkan akses jaringan jalan barat-timur dan utara-selatan; dan
4. mengembangkan RTH.

d. Penataan wilayah pelayanan E:

1. mempertahankan dan melindungi kawasan resapan air;
2. mengendalikan perkembangan perumahan;
3. mengendalikan skala pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
4. mengembangkan RTH.





Gambar 4.5 Peta Administrasi Pembagian Wilayah Perencanaan

Selain rencana struktur ruang, Kota Baru Moncongloe pun merencanakan pola ruang kota. Dari sisi optimalisasi peruntukan ruang, pola yang akan dikembangkan harus dapat menampung kegiatan–kegiatan utama yang termasuk kegiatan pemukiman, selain itu pemanfaatan ruang kota akan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dengan mengalokasikan peruntukan ruang untuk konservasi.

6. Analisis Dan Evaluasi

Perencanaan dan perancangan merupakan aspek penting dalam menata suatu kawasan perkotaan. Dari segi perencanaan kota, sebenarnya Kota Baru Moncongloe sudah memiliki perencanaan yang cukup baik bagi perkembangan kotanya.

Hal ini dapat dilihat dari adanya konsep wilayah pelayanan (WP). Dimana konsep WP ini memberikan tujuan utama untuk mengurangi pergerakan masyarakat ke pusat kota. Untuk mewujudkan kota hijau maka pada penerapan beberapa model perencanaan dan perancangan kota yang ada pun harus diimplementasikan dan terintegrasi secara baik dalam segala aspek.

Selain adanya konsep WP yang lebih memfokuskan pada pencegahan kepadatan kegiatan di pusat kota, maka perlu juga dikembangkan perencanaan kawasan dengan penggunaan campuran, pengembangan hunian vertikal dan lainnya. Berikut ini adalah tabel evaluasi

penerapan *green planning and design* di Kota Baru Moncongloe (Tabel 4.15).

Tabel 4.15 *Green Planning and Design* di Kecamatan Moncongloe

No.	Model Penerapan	Hasil Evaluasi	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1.	<i>Land Used</i>	Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Moncongloe menjadi salahsatu perkembangan yang pesat terjadi, namun pembangunan masih bersifat horizontal, belum ada rencana pembangunan dan pengembangan bangunan vertikal. Pemerintah telah menyusun perencanaan RTH di Kecamatan Moncongloe dan semua perencanaan telah terzoning dengan baik dan telah ada penerapan di lokasi penelitian.				✓	
2.	<i>Luas RTH</i>	Kepadatan Penduduk di Kecamatan Moncongloe yaitu 427,65 jiwa/km ²				✓	
3.	<i>Kepadatan Penduduk</i>						✓
Nilai Penerapan Total					10		
Nilai Maksimal					12		
Persentase Penerapan Indikator <i>Green Planning and Design</i>					83,33 %		

Keterangan:

- a) Keterangan Skor lihat tabel 4.15
- b) Nilai Penerapan Total [(XT) = 3 + 3 + 4]
- c) Nilai Maksimal [(Xmax)= 3 × 4]
- d) Persentase Penerapan Indikator [(%) = $\frac{10 (XT)}{12 (Xmax)} \times 100\%$]

Dari Hasil Evaluasi di atas menunjukkan bahwa pencapaian indikator *Green Planning and Design* di Kecamatan Moncongloe sudah mencapai 83,33%. Nilai ini menunjukkan bahwa realisasi dari konsep perencanaan dan perancangan Kecamatan Moncongloe yang berbasis kota hijau sudah baik namun belum maksimal. Pemerintah telah membuat rencana dan program yang akan

dikembangkan kedepannya, namun implementasi masih didominasi oleh pembangunan kawasan perumahan dan permukiman.

Adapun Penyebab dan kendala yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Moncongloe menjadi salahsatu perkembangan yang pesat terjadi, namun pembangunan masih bersifat horizontal, belum ada rencana pembangunan dan pengembangan bangunan vertikal maupun pembangunan dengan konsep *eco building*.
2. Pemerintah sudah menyusun pola perencanaan campuran atau *Mixed Used* di Kecamatan Moncongloe dan semua perencanaan telah terzoning dengan baik namun masih perlu beberapa penyesuaian terkait zonasi Ruang Terbuka Hijau yang berada pada lahan kepemilikan milik pribadi.
3. Pemerintah telah menyusun perencanaan RTH di Kecamatan Moncongloe dan semua perencanaan telah terzoning dengan baik dan telah ada penerapan di lokasi penelitian namun masih perlu ada penyelesaian terkait lahan RTH diatas kepemilikan lahan pribadi.
4. Minimnya investor swasta dan terbatasnya dana APBD milik pemerintah Kabupaten Maros yang menjadi salahsatu kendala terhambatnya pertumbuhan yang ada di Kota baru Moncongloe, maka perlu adanya pentahapan penyusunan pembangunan hingga jangka panjang yaitu 20 Tahun Kedepan.
5. Dokumen RDTR yang cenderung masih baru berjalan sekitar 3 tahun juga merupakan salahsatu faktor belum terpenuhinya indikator secara penuh dan masih minimnya implementasi dilapangan sehingga masih kurang skoring untuk penilaian indikator *Green City*, maka dari itu perlu waktu untuk dapat menilai indikator *Green City* secara keseluruhan hingga mendapatkan nilai 100%.

Saat ini Kecamatan Moncongloe sudah membuat dokumen rencana mengenai perencanaan dan perancangan kota mencakup rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang tertera didalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang.



Gambar 4.8 Rencana Pengembangan Kawasan Kota Hijau Kota Baru Moncongloe

C. Strategi Penerapan Kota Hijau dan Keberlanjutan pembangunan

Adapun strategi dalam menerapkan keberlanjutan pembangunan kota hijau di Kawasan Kota Baru Moncongloe dapat dijabarkan kedalam tabel indikasi program, Indikasi Program adalah petunjuk yang memuat usulan program, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Tabel 4.16 Indikasi Program 5 tahunan di Wilayah Perencanaan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP I (TAHUN 2020-2024)					TAHAP II (THN 2025- 2029)	TAHAP III (THN 2030 - 2034)	TAHAP IV (THN 2035- 2039)		
				1	2	3	4	5					
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang												
A.	Perwujudan Pusat-Pusat Pelayanan Kota												
1	Pemantapan/peningkatan kualitas fungsi pusat pelayanan Kota	PPK	1 Kawasan								APBD Kabupaten Swasta Masyarakat	Dinas PUPR Kab. Swasta Masyarakat	
2	Pemantapan/peningkatan kualitas fungsi sub pusat pelayanan Kota	Sub PPK	3 Kawasan								APBD Kabupaten Swasta Masyarakat	Dinas PUPR Kab. Swasta Masyarakat	
3	Pemantapan/peningkatan kualitas fungsi Pusat Lingkungan	Pusat Lingkungan RW	Tersebar ke pusat-pusat dusun								APBD Kabupaten Swasta Masyarakat	Dinas PUPR Kab. Swasta Masyarakat	
B.	Rencana Jaringan Transportasi												
1.	Rencana Pembangunan Jalan Nasional (jalan bebas hambatan)	Sub-BWP IB, Sub-BWP IC dan Sub-BWP ID	5,37 Km										
	• Pembebasan Lahan	Sub-BWP IB, Sub-BWP IC dan Sub-BWP ID	-								APBN Swasta	Kementerian PU Swasta	
	• Rencana Pembangunan	Sub-BWP IB, Sub-BWP IC dan Sub-BWP ID	5,37 Km								APBN Swasta	Kementerian PU Swasta Masyarakat	
2.	Jalan Kabupaten												
A.	Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan												
	1. Jalan kolektor primer tiga (JKP-3)												

	• Ruas jalan poros Pamanjengan - Patontongan	Sub-BWP I.A, Sub-BWP I.B	6,78 Km															APBD Provinsi Swasta	Dinas PU Provinsi Swasta
	• Ruas jalan Poros Pamanjengan - Bantimurung	Sub-BWP I.A, Sub-BWP I.C dan Sub-BWP I.D	6,45 Km															APBD Provinsi Swasta	Dinas PU Provinsi Swasta
	2. Ruas jalan kolektor sekunder																		
	• Ruas jalan di Desa Moncongloe Lappara dan Desa Moncongloe	Sub-BWP I.A	1,79 Km															APBD Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten Swasta
	• Ruas jalan di Desa Moncongloe Lappara dan Desa Moncongloe Bulu	Sub-BWP I.A dan Sub-BWP I.D	2,31 Km															APBD Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten Swasta



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP I (TAHUN 2020-2024)					TAHAP II (THN 2025- 2029)	TAHAP III (THN 2030 - 2034)	TAHAP IV (THN 2035- 2039)		
				1	2	3	4	5					
	• Ruas jalan di Desa Moncongloe Bulu	Sub-BWP I.D	5,60 Km									APBD Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten Swasta
	• Ruas jalan di Desa Moncongloe Bulu, Desa Bonto Bunga dan Desa Bonto Marannu	Sub-BWP I.D, Sub-BWP I.C dan Sub-BWP I.B	5,52 Km									APBD Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten Swasta
	• Ruas jalan di Desa Bonto Bunga	Sub-BWP I.B	2,06 Km									APBD, Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten, Swasta
	• Ruas jalan Di Desa Bonto Marannu	Sub-BWP I.B	4,70 Km									APBD, Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten, Swasta
	3. Ruas jalan lokal primer												
	• Ruas jalan di Desa Moncongloe Bulu dan Ruas jalan di Desa Bonto Bunga	Sub-BWP I.D dan Sub- BWP I.C	3,17 Km									APBD, Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten, Swasta
	• Ruas jalan di Desa Moncongloe Bulu	Sub-BWP I.C	1,70 Km									APBD, Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten, Swasta
	• Ruas jalan di Desa Bonto Bunga	Sub-BWP I.C	3,63 Km									APBD, Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten, Swasta
	4. Ruas jalan lokal sekunder												
	• Ruas jalan di Desa Moncongloe Lappara	Sub-BWP I.A	1,36 Km									APBD, Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten, Swasta
	• Ruas jalan di Desa Moncongloe Bulu	Sub-BWP I.D	3,10 Km									APBD, Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten, Swasta
	• Ruas jalan di Desa Moncongloe Bulu dan ruas jalan di Desa Bonto Bunga	Sub-BWP I.D dan Sub- BWP I.C	0,95 Km									APBD, Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten, Swasta
	5. Ruas jalan lingkungan	Di seluruh Sub-BWP.	-										
B.	Rencana Pembangunan Jaringan Jalan Baru												
	1. Ruas jalan kolektor primer tiga (JKP-3)												
	• Ruas jalan di Desa Moncongloe Lappara dan di Desa Moncongloe	Sub-BWP I.A	1,91 Km									APBD, Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten, Swasta
	• Ruas jalan di Desa Bonto Marannu	Sub-BWP I.B	2,62 Km									APBD, Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten, Swasta
	• Ruas jalan di Desa Bonto Bunga	Sub-BWP I.C	2,00 Km									APBD, Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten, Swasta

	• Ruas jalan di Desa Moncongloe Bulu	Sub-BWP I.D	1,84 Km									APBD,, Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten, Swasta
2. Ruas jalan kolektor sekunder													
	• Ruas jalan di Desa Moncongloe Lappara dan di Desa Moncongloe	Sub-BWP I.A	6,94 Km									APBD,, Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten, Swasta
	• Ruas jalan di Desa Bonto Marannu	Sub-BWP I.B	7,36 Km									APBD,, Kabupaten Swasta	Dinas PU Kabupaten, Swasta



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari aspek perencanaan dan perancangan kota (*green planning and design*), saat ini Kabupaten Maros sudah membuat beberapa dokumen teknis terkait pengembangan kota yang terdiri Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), *Detail Engineering Desain* (DED), serta Masterplan RTH. Dalam perencanaan kotanya, Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kota Baru satelit Mamminasata di Kecamatan Moncongloe berfokus kepada pembuatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Pencapaian penerapan indikator perencanaan dan perancangan kota di Kecamatan Moncongloe itu sendiri telah mencapai 66,66%.
2. Adapun kendala dalam penerapan konsep green city ini sendiri ialah dokumen perencanaan yang baru terbit pada tahun 2021 maka belum ada implementasi di lapangan yang berkaitan dengan indikator kota hijau maka dari itu perlu adanya program kerja secara bertahap yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
3. Untuk mencapai kondisi ideal dari indikator *green planning and design*, langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memaksimalkan penerapan model *mixed use development*, lalu dikembangkan bersama dengan kawasan pejalan kaki serta pembentukan *transit oriented development* (TOD) untuk mengurangi mobilitas penduduk dengan kendaraan sehingga akan mengurangi pula masalah polusi dan kemacetan di Kecamatan Moncongloe.

B. Saran

Dalam pengembangan konsep kota hijau, perlu dilakukan secara bersama baik dari pihak pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta untuk menciptakan Kota Baru Satelit Mamminasata di Kecamatan Moncongloe yang aman, nyaman dan berkelanjutan. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Maros harus lebih mengajak komunitas hijau dalam setiap kegiatan atau aksi hijau yang akan dilakukan serta berperan sebagai media sosialisasi kepada masyarakat umum

untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan konsep kota hijau. Selain itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap konsep pengembangan kota hijau ini agar didapatkan standar yang tepat bagi penerapan konsep kota hijau dan mendapatkan database yang lebih akurat mengenai kondisi aktual Kabupaten Maros.



DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Putri (2012). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Di Kota Depok. Skripsi Universitas Indonesia.
- Amira. (2014). Evaluasi Penerapan Kota Hijau di Kota Jakarta. Skripsi IPB Bogor.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros. (2019). Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2015-2019.
- Desdyanza, Nurul Anisyah. (2014). Evaluasi Penerapan Konsep Kota Hijau di Kota Bogor: Skripsi Institut Pertanian Bogor.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2012). Kota Hijau sebagai solusi pengembangan kota di Indonesia. Jakarta.
- El Ghorab, Hosam., Shalaby, Heidi. A. (2016). "*Eco and Green Cities as New aproaches for planning and developing cities in Egypt*": Department of Architecture, Faculty Engineering , Zagazig University, Egypt
- Gusnita. (2010). "*Green Transport*": Transportasi Ramah Lingkungan Dan Kontribusi dalam mengurangi polusi udara
- Hidayat, Syarif Imam. (2016) "*Green City: Solusi Problematika Perkotaan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan*". Jurnal Fakultas Pertanian UPN Veteran, Jawa Timur.
- Jamaluddin, Jihan. (2018). Strategi Penerapan Konsep "*Green City*" di Kota Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Mindasari, Sri (2015). Evaluasi Program Pengembangan Kota Hijau (*Green City*) di Kota Kendari.
- Darmawan L Cahya (2016). Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bekasi. Jurnal Planesa Volume 7.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2011). Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau.
- Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang. (2013). Panduan Kota Hijau di Indonesia. Jakarta.
- Lestari, Noor, Ribawanto. (2012). Pengembangan RTH Dalam Upaya Mewujudkan *Sustainable City* Surabaya. Kota Surabaya
- Republik Indonesia. (2012). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032.

Republik Indonesia. (2019). Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru Mamminasata di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros Tahun 2020-2040.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Panjhi Arieq Naufal Mugni lahir di Ujung Pandang, 8 Maret 1998, merupakan putra pertama dari pasangan Ir. Muchtar Affandy, dan Jouharotun Ni'mah. Alamat di Jalan Pelita Raya VI Blok C No.9, Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Dengan riwayat pendidikan yakni pada TK Teratai UNM Makassar (2002-2004); SDN

Mongisidi III (2004-2010); SMP Negeri 1 Bitung (2010-2013); SMA Negeri 15 Makassar (2013-2016). Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Bosowa Makassar melalui jalur reguler dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar setelah berhasil menyelesaikan bangku perkuliahan selama 4,5 tahun.

Sampai dengan penulisan tesis ini penulis masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program Strata Dua (S.2) Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas BOSOWA Makassar.

Berkat Rahmat dan Ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang Berjudul "Evaluasi Implementasi Konsep *Green Planning And Design* (Studi Kasus Pada Kawasan Kota Baru Mamminasata Di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros)"